

LAPORAN KEGIATAN

TAHUN 2024

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

pa_palangkaraya@yahoo.co.id www.pa-palangkaraya.go.id Pengadilan Agama Palangka Raya @pa_palangka_raya PA Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim



Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A Tahun 2024 dengan tepat waktu.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024 menggambarkan tentang Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A sepanjang Tahun 2024, meliputi Teknis Yustisial, Pengawasan, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Saran dan Prasarana serta Pengelolaan Keuangan dan lain sebagainya. Pelaksanaan Tugas ini sebagai wujud dari pelaksanaan Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A sebagai tolok ukur capaian kinerja yang diperoleh selama kurun waktu tertentu, dalam upaya Implementasi kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, serta kebijakan mandiri Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A, dalam upaya peningkatan kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024 dibuat dengan berpedoman pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4506/SEK/0T.1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A Tahun 2024 dibuat semaksimal mungkin, namun apabila masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyajiannya, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan dimasa yang akan datang. Terima kasih atas kerjasama semua Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A Tahun 2024 yang bekerja maksimal, sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu serta kepada semua pihak yang berkepentingan, semoga laporan ini memberikan manfaat. Terima kasih.

Palangka Raya, 31 Desember 2024
Ketua,

Dr. Yusri, S.Ag., M.H.
NIP. 197110291998031001

DAFTAR ISI

PENGANTAR i
Daftar Isi ii
BAB I **Pendahuluan** 1
BAB II **A.** **Keadaan Perkara di Peradilan Agama** 13
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 13
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 17
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 17
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjaun Kembali 18

B. **Penyelesaian Perkara** 18
1. Jumlah Sisa Perkara yang Putus 18
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu 19
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK 20
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi 21

C. **Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)** 22
1. Posbakum 24
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu (Sidang di Luar Gedung) 25
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 26

BAB III **Sumber Daya Manusia** 29
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/ golongan/ pendidikan 29
A. Mutasi 31
B. Promosi 34
C. Pensiun 35
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) 36

BAB IV **Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi** 43
A. Pengelolaan Keuangan 43
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 45
C. Pengelolaan Teknologi Informasi 59
1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Agama 59
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama 63

BAB V **Peningkatan Pelayanan Publik** 62
A. Mall Pelayanan Publik 64
B. Akreditasi Penjamin Mutu Surveillance 66
C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 67
D. Inovasi Pelayann Publik 70

BAB VI **Pengawasan** 85
A. Internal 86
B. Eksternal 92
C. Evaluasi 92

BAB VII **Penutup** 94
A. Kesimpulan 95
B. Rekomendasi 97

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA

- Jl Kapten Piere Tendean No 2
- www.pa-palangkaraya.go.id
- pa_palangkaraya@yahoo.co.id
- (0536) 3221289

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya di bawah Mahkamah Agung RI, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisiensi dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).pada setiap akhir tahun tiap-tiap satuan kerja di bawah Mahkmah Agung RI membuat laporan kegiatan dalam satu tahun.

KILAS BALIK TAHUN

Dalam rangka mewujudkan Akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diterbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2023 Tentang percepatan transfromasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Perpres ini mengatur tentang percepatan transfromasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi

dan interoperabilitas. Aplikasi SPBE Prioritas dapat berupa: a. Aplikasi SPBE yang baru akan beroperasi atau akan dibangun; dan b. Aplikasi SPBE yang telah beroperasi atau akan dikembangkan, yang memiliki minimal 200.000 (dua ratus ribu) Pengguna SPBE atau target Pengguna SPBE.

MAHKAMAH AGUNG

Sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3552/SEK/HM3.1.1/VIlI/2024 tentang Peringatan HUT ke-79 Mahkamah Agung RI mengusung tema "Peradilan Tangguh, Indonesia Maju". Dalam dokumen Pidato Ketua Mahkamah Agung RI disebutkan tema tersebut mengandung makna bahwa peradilan yang tangguh memegang peranan penting bagi tumbuh kembangnya sebuah negara, karena fungsi Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya merupakan salah satu pilar kekuasaan yang menopang berdirinya sebuah negara tangguhnya lembaga peradilan sangat ditentukan oleh integritas dan profesionalitas dari segenap aparaturnya, karena itu integritas dan profesionalitas harus menjadi tolak ukur yang utama dalam mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung.

Perkembangan zaman dewasa ini telah berdampak pada semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat tidak hanya sekedar mengharapkan penegakan hukum yang adil, tetapi dibutuhkan juga adanya transparansi, kecepatan, dan kemudahan dalam proses berperkara. Kemajuan teknologi telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk bisa mengetahui setiap tahapan dalam proses berperkara.

Hal tersebut mendorong terjadinya perubahan secara signifikan bagi sistem peradilan Indonesia, dengan melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah telah dilakukan penerapan sistem peradilan elektronik berbasis teknologi informasi yang dapat mempercepat proses penyelesaian perkara,

mengurangi prosedur birokrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi lembaga peradilan, selain itu juga didukung berbagai aplikasi layanan seperti aplikasi E-COURT, E- BERPADU, e-BIMA, e-SADEWA, dan aplikasi SISLITBANG.

Dalam rangka pengembangan aplikasi yang telah ada Mahkamah Agung menggandeng pula Instansi pemerintah guna mempercepat pemberian pelayanan. Pada tahun 2023 MA bekerja sama dengan PT. POS Indonesia dengan adanya surat tercatat sebagaimana diatur dalam SEMA N0. 1 Tahun 2023. Kerja sama tersebut terjawantah dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia (Persero) pada Senin siang, 22 Mei 2023 di kantor Pos Indonesia, Jakarta. Penandatangan ini dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana. Kerja sama ini merupakan lanjutan Mahkamah Agung dalam modernisasi administrasi perkara. Kerjasdama ini berlaku di 4 lingkungan peradilan yang ada di Mahkamah Agung termasuk pada Dirjen Badan Peradilan Agama.

Tahun 2024 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki 5 (lima) Program Prioritas sebagaimana diatur dalam keputusan direktur jenderal badan peradilan agama nomor: 052/DJA.1/HM.00/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2024 yaitu : 1. Penguatan Integritas, 2. Peningkatan Kualitas Layanan Peradilan, 3. Penguatan Kelembagaan, 4. Penguatan Kepemimpinan dan SDM, 5. Penguatan Teknologi Informasi.

Kebijakan dan Inovasi Direkturat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung R.I., menunjukkan bahwa Ditjen Badilag berkomitmen untuk melakukan perubahan paradigma kinerja organisasi dari

sistem manual ke sistem digital. Hal ini sesuai dengan orientasi pemerintah pada saat ini yang mendorong terselenggaranya "SPBE" yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sejak tahun 2019, Ditjen Badilag telah mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan inovasi atau aplikasi untuk meningkatkan kinerja pengadilan dan peningkatan pelayanan publik dengan 22 aplikasi telah *launching* secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung RI. 22 Inovasi tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. **Inovasi Peningkatan Kinerja**; terdiri dari aplikasi Badilag Command Center, E-Register Perkara, E-Keuangan Perkara, E-PNBP Perkara, E-Eksaminasi, Aplikasi Vision, Pusat Data, Aplikasi CCTV Online (ACO), E-Laporan dan Aplikasi Penilaian APM.
2. **Inovasi Pelayanan Publik**; terdiri dari Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Info Produk Pengadilan, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Basis Data Kemiskinan, Aplikasi Validasi Akta Cerai, Aplikasi Gugatan Mandiri, PTSP Online, Portal Ekonomi Syari'ah, dan Badilag Call Center.

Hal ini selarasa sebagaimana mewujudkan Akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diterbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2023 Tentang percepatan transfromasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

Berpedoman dengan hal tersebut Pengadilan Agama Palangka Raya telah melakukan tindak lanjut melalui adanya pembuatan inovasi dalam beberapa hal, diantaranya:

1. **Layanan Pengadilan berbasis Teknologi**

Layanan di Pengadilan Agama terletak dari sejak pihak tiba di pengadilan, melakukan pendaftaran, mengikuti persidangan hingga pengambilan produk. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan inovasi guna memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat khususnya disabilitas melalui lahirnya layanan tambahan, yaitu:

a. **Antrian Sidang ElektroniK (ASEK)**

Antrian Sidang ElektroniK atau ASEK adalah layanan antrian secara online yang dapat diakses oleh pihak berperkara dari mana saja dengan keunggulan adanya fitu jenis kebutuhan khusus atau alat yang diperlukan oleh pihak (jika ia disabilitas) serta *live streaming* progres nomor antrian sidang guna memberikan ruang bagi pihak untuk menentukan waktu tiba di pengadilan.

b. **Drive Thru Pengambilan Produk (DTPP)**

Drive Thru Pengambilan Produk atau DTPP adalah layanan pengambilan produk secara mudah bagi pihak tanpa harus meninggalkan kendaraannya dengan pengambilan antrian secara online. Melalui DTPP pihak kini tidak perlu masuk dan menunggu lama ke dalam PTSP untuk mengambil produk pengadilan.

c. **Terjemahan Bahasa Isyarat pada Video layanan Pengadila Agama Palangka Raya.**

Tindak lanjut Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memedomani pedoman dari badilag terkait pelayanan ramah bagi penyandang disabilitas salah satunya dilaksanakan melalui kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa 1 Palangka Raya (SLBN 1 Palangka Raya) tentang Kerja Sama Bidang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas pada tahun 2022.

2. Media Informasi

Pelayanan yang ditingkatkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya bagi masyarakat juga mencakup pemberian layanan informasi secara digital dalam bentuk audio visual agar lebih mudah dipahami oleh pencari keadilan. Guna memberikan manfaat lebih diantaranya video tersebut, telah ditambahkan juga dengan Juru Bahasa Isyarat sehingga pihak disabilitas rungu dapat memahami video tersebut.

Lebih lanjut, dalam upaya memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan, sebagai langkah mewujudkan Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung dan Bermartabat dan dipercaya masyarakat, Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 20 Desember

2018 telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Gambar 1.1
Penandatangan Pakta Integritas

Selain itu, Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari senin, 2 Januari 2024 kembali melakukan Penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud komitmen anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penandatanganan Pakta Integritas tanggal 29 September 2022. Hal ini sesuai dengan instruksi Pimpinan Mahkamah Agung dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Pakta Integritas yang ditandantangani adalah sebagai bentuk janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab,wewenang

dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan neoptisme.

Optimalisasi penyelesaian perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui e-court berdasarkan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No.1465/DJA/HK.05/SK/IX2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

Adapun penyelesaian perkara melalui e-court pada Pengadilan Agama Palangka Raya selama tahun 2024 sebanyak 327 perkara dari jumlah perkara 615 atau sebesar 53,27 %, dengan perincian selama 3 (tiga) bulan terakhir sebagai berikut:

1. Bulan Oktober = 83.33%
2. Bulan November = 98,15%
3. Bulan Desember = 100%

Disamping itu pula Pengadilan Agama Palangka Raya juga telah membuat Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai tindaklanjut dari surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. Layanan PTSP dirasakan sangat membantu dan memudahkan masyarakat, karena tersentralisasi disatu tempat / ruangan, hal ini juga dapat meminimalisir terhadap hal-hal yang dapat mencederai marwah pengadilan.



Gambar 1.2
Ruang Layanan PTSP Pengadilan Agama Palangka Raya

Dalam rangka menciptakan pelayanan prima Pengadilan Agama Palangka Raya menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Nomor : 0042 /KPA.W16-A1/SK.OT1.2/II/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 2 Februari 2024. Dengan adanya standar pelayanan tersebut petugas di lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya jadi memiliki acuan yang jelas dalam bertindak sehingga pelayanan kepada para pencari keadilan pun dapat terealisasikan dengan maksimal.



Gambar 1.3
Seragam Petugas PTSP Pengadilan Agama Palangka Raya

Guna mempersiapkan penilaian kinerja dan transaparansi pengadilan Pengadilan Agama Palangka Raya menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0768/KPA.W16-A1/SK.KU2.2/IX/2024 tentang Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Satuan Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2024 tertanggal 24 September 2024 berbarengan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0769/KPA.W16-A1/SK.KU2.2/IX /2024 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Satuan Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2024 tertanggal 24 September 2024.

Sampai dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024, Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A telah merampungkan tindak lanjut atas pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah merupakan gambaran masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh suatu Badan Peradilan, dengan berpijak pada visi Mahkamah Agung R.I, Pengadilan Agama Palangka Raya telah menyusun visi sbb :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya Yang Agung"

2. Misi

Misi adalah suatu program yang diemban untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar Pengadilan Agama Palangka Raya melaksanakannya dengan baik, maka misi yang telah di tetapkan adalah sbb :

1. Mewujudkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
2. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negatif pihak ketiga;
3. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.

C. Tujuan dan Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai VISI dan MISI Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana tersebut di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goals*) organisasi yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan MISI yang akan dicapai. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin ditempuh:

Tujuan :

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka

Raya yang berkualitas.

4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

Sasaran Strategis :

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas.
4. Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal.
5. Peningkatan tertib administrasi perkara.
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
7. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan. Prasarana Mahkamah Agung RI

BAB II

KEADAAN PERKARA

Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA

- Jl Kapten Piere Tendean No 2
- www.pa-palangkaraya.go.id
- pa_palangkaraya@yahoo.co.id
- (0536) 3221289

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2024, meliputi sisa perkara tahun 2023 dan perkara diterima pada tahun 2024, sebagai berikut:

- Sisa tahun lalu : **4 perkara**
- Diterima : **615 perkara**
- Dicabut : **70 perkara**
- Dikabulkan : **461 perkara**
- Ditolak : **43 perkara**
- Tidak Diterima : **32 perkara**
- Dicoret dari register : **- perkara**
- Digugurkan : **5 perkara**
- Sisa akhir tahun : **8 perkara**

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2024 dikelompokkan dalam perkara gugatan dan permohonan, maka rinciannya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Perkara Gugatan dan Permohonan Tahun 2024

No	Bulan	Gugatan				Permohonan			
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	Januari	4	58	36	26	0	17	11	6
2	Februari	26	43	30	39	6	32	11	27
3	Maret	39	28	30	37	27	5	30	2
4	April	37	23	13	47	2	5	2	5
5	Mei	47	52	40	59	5	8	8	5
6	Juni	59	37	41	55	5	4	8	1
7	Juli	55	56	49	62	1	6	5	2
8	Agustus	62	63	51	74	2	16	12	6
9	September	74	32	57	49	6	6	9	3
10	Oktober	49	40	46	43	3	2	3	2
11	November	43	47	40	50	2	7	6	3
12	Desember	50	25	67	8	3	2	5	0

Sisa perkara tahun 2023 sebanyak 4 perkara dengan rincian jenis perkara sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Sisa Perkara Tahun 2023

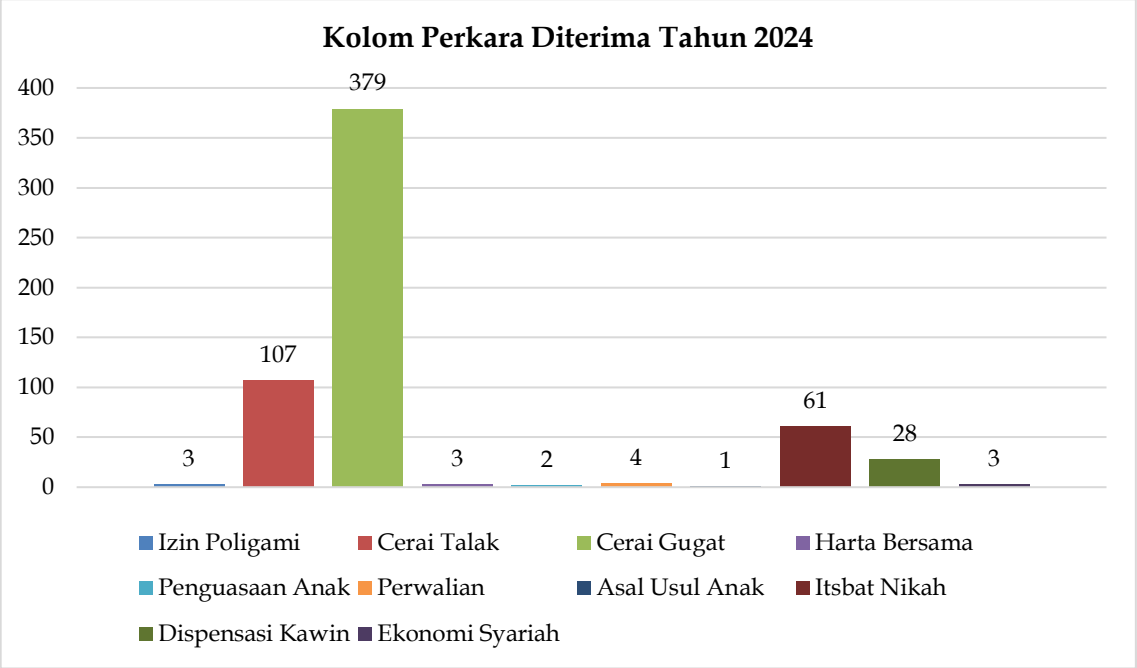
No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	4
Jumlah		**4**

- Perkara diterima tahun 2024 sebanyak 615 perkara dengan rincian jenis perkara sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Perkara Diterima Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	3
2	Cerai Talak	107
3	Cerai Gugat	379
4	Harta Bersama	3
5	Penguasaan Anak	2
6	Perwalian	4
7	Asal Usul Anak	1
8	Istbat Nikah	61
9	Dispensasi Kawin	28
10	Ekonomi Syariah	3
11	Kewarisan	3
12	P3HP/Penetapan Ahli Waris	18
13	Lain – lain	3
Jumlah		**615**

Kolom 2.1
Perkara Diterima Tahun 2024



- Perkara yang diputus (Dicabut, Dikabulkan, Ditolak, Tidak Diterima, Dicoret dan Digugurkan) tahun 2024 sebanyak 611 perkara dengan rincian jenis perkara putus sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.4

Perkara Diputus Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari Register	Jumlah
1.	Izin Poligami	2	1	-	-	-	-	3
2.	Cerai Talak	14	83	4	3	2	-	106
3.	Cerai Gugat	45	310	6	16	2	--	379
4.	Harta Bersama	-	1	-	1	-	-	2
5.	Penguasaan Anak	-	2	-	-	-	-	2
6.	Perwalian	-	4		-	-	-	4
7.	Asal Usul Anak	-	1	-	-	-	-	1
8.	Istbat Nikah	-	22	33	5	1	-	61
9.	Dispensasi Kawin	1	26	-	1	-	-	28
10.	Ekonomi Syariah	-	-	-	3	-	-	3
11.	Kewarisan	2	-	-	1	-	-	3
12.	P3HP	6	11	-	1	-	-	18
13.	Lain-lain	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		**70**	**461**	**43**	**32**	**5**	**-**	**611**

- Sisa perkara tahun 2024 sebanyak 8 perkara dengan rincian jenis perkara sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Sisa Perkara Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	2
2	Cerai Talak	3
3	Harta Bersama	1
4	Lain-lain	2
Jumlah		8

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Selama tahun 2024, Pengadilan Agama Palangka Raya telah menerima perkara banding sebanyak 5 perkara dan sisa tahun 2023 sebanyak 1 perkara serta perkara diputus pada tahun 2024 sebanyak 3 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perkara Banding Tahun 2024

No	Nomor Perkara PA	Tanggal Perkara			
		Putusan PA	Permohonan Banding	Putusan Banding	Pemberitahuan ke Para Pihak
1	301/Pdt.G/2024/PA.Plk	27-11-2023	08-12-2023	17-01-2024	18-01-2024
2	305/Pdt.G/2024/PA.Plk	13-09-2024	30-09-2024	13-11-2024	14-11-2024
3	384/Pdt.G/2024/PA.Plk	01-10-2024	07-10-2024	18-11-2024	19-11-2024
4	350/Pdt.G/2024/PA.Plk	0-12-2024	02-12-2024		
5	130/Pdt.G/2024/PA.Plk	09-12-2024	20-12-2024		
6	444/Pdt.G/2024/PA.Plk	09-12-2024	23-12-2024		

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pengadilan Agama Palangka Raya selama tahun 2024 telah menerima perkara dalam tingkat kasasi sebanyak 2 perkara dan sisa tahun 2023 sebanyak 2 perkara serta perkara diputus pada tahun 2024

sebanyak 3 perkara sisa 1 perkara kasasi.

Tabel 2.7

Perkara Kasasi Tahun 2024

No	Nomor Perkara PA	Tanggal Perkara			
		Putusan PA	Putusan Banding	Permohonan Kasasi	Putusan Kasasi
1	195/Pdt.G/2023/PA.Plk	24-08-2023	17-10-2023	30-10-2023	26-02-2024
2	318/Pdt.G/2023/PA.Plk	24-10-2023	13-12-2023	21-12-2023	23-04-2024
3	301/Pdt.G/2023/PA.Plk	27-11-2023	17-01-2024	01-02-2024	30-07-2024
4	384/Pdt.G/2024/PA.Plk	01-10-2024	18-11-2024	29-11-2024	-

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pengadilan Agama Palangka Raya selama tahun 2024 tidak menerima perkara peninjauan kembali.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2024 terdapat sisa perkara yang belum diselesaikan dari tahun 2023 sebanyak 4 perkara. Sisa perkara tahun 2023 terdiri dari 4 perkara gugatan. Sisa perkara tersebut telah diselesaikan dalam tahun 2024 sebanyak 4 perkara (100%).

Sisa perkara yang diselesaikan tersebut dilihat dari jenis perkaranya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8

Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah	Diputus	Sisa
1	Cerai Gugat	4	4	0
Jumlah		4	4	0

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2024 menerima perkara sebanyak 615 perkara yang terdiri dari 505 perkara gugatan dan 110 perkara permohonan. Dari jumlah perkara yang diterima tersebut sebanyak 505 perkara gugatan dan 110 perkara permohonan telah diselesaikan secara tepat waktu (perkara diterima dan diselesaikan pada tahun berjalan), dan terdapat 1 perkara gugatan yang diputus tidak tepat waktu (melebihi 5 bulan).

Bila dilihat dari jenis perkara, Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2024 telah menyelesaikan perkara secara tepat waktu sebanyak 610 perkara dan 1 perkara tidak tepat waktu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9

Perkara Putus Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Jumlah
1	Izin Poligami	3	0	**3**
2	Cerai Talak	105	1	**106**
3	Cerai Gugat	379	-	379
4	Harta Bersama	2	-	**2**
5	Penguasaan Anak	2	-	**2**
6	Perwalian	4	-	**4**
7	Asal Usul Anak	1	-	**1**

8	Istbat Nikah	61	-	**61**
9	Dispensasi Kawin	**28**	-	**28**
10	Ekonomi Syariah	3	-	**3**
11	Kewarisan	3	-	**3**
12	P3HP	18	-	**18**
13	Lain-lain	1	-	**1**
Jumlah		610	1	611

Tabel 2.10
Perkara Putus tepat Waktu 2024



3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2024 telah memutus sisa perkara tahun 2023 sebanyak 4 perkara dan memutus perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 607 perkara. Sehingga jumlah perkara yang diputus selama tahun 2024 sebanyak 611 perkara.

Dari jumlah perkara yang diputus tersebut sebanyak 606

perkara tidak mengajukan upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Sedangkan perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 5 perkara dan mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 perkara. Dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.11

Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum

No.	Upaya Hukum		
	Banding	Kasasi	PK
1	305/Pdt.G/2024/PA.Plk	384/Pdt.G/2024/PA.Plk	-
2	384/Pdt.G/2024/PA.Plk	-	-
3	350/Pdt.G/2024/PA.Plk	-	-
4	130/Pdt.G/2024/PA.Plk	-	-
5	444/Pdt.G/2024/PA.Plk	-	-

Adapun perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) dengan perkara yang diputus pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2.12

Perbandingan Perkara Putus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum

No.	U r a i a n	Jumlah
1.	Perkara Diputus	611
2.	Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum	606
3.	Perkara Mengajukan Upaya Hukum	5

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada ara Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta

berkeadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Palangka Raya telah melaksanakan mediasi sebanyak 90 perkara. Dari sejumlah perkara tersebut sebanyak 66 perkara berhasil dilakukan mediasi, sebanyak 22 perkara tidak berhasil dimediasi, sebanyak 2 perkara tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada perkara yang masih dalam proses mediasi.

Tabel 2.13

Pelaksanaan Mediasi Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Perkara yang Dimediasi	90
2	Berhasil Mediasi	66
3	Tidak Berhasil Mediasi	22
4	Tidak dapat Dilaksanakan	2
5	Masih dalam Proses Mediasi	0

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Semenjak digulirkannya Akreditasi di beberapa Pengadilan, semula dikenal dengan istilah ISO, kemudian Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM), selanjutnya sekarang dikenal dengan istilah Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).



Gambar 2.1
Setifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Palangkaraya Kelas IA

Pengadilan Agama Palangka Raya sejak tahun 2020 telah menerapkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dan berhasil memperoleh nilai"***A-Excellanct***". Sejalan dengan perkembangannya SAPM berubah menjadi APM. Pengadilan Agama Palangka Raya telah melewati Asessmen Surveillence I Tahun 2021 dan hasilnya kembali mendapatkan "***A-Excellenct***"

Pada akhir tahun 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Surat Nomor 4095/DJA.3/HM.00/9/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Perubahan Kegiatan Asesmen APM Tahun 2022. Pada pokoknya surat tersebut menyatakan bahwa Pelaksanaan Asessmen Akreditas Penjaminan Mutu tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Surat Direktur Jenderal Nomor 2862/DJA/H.M.00/9/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2022 dinyatakan tidak diperlukan lagi. Kendati demikian, Pengadilan Agama Palangka Raya telah menyelesaikan persiapan assessment tersebut sehingga data/eviden yang telah diunggah akan dimanfaatkan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan implementasi administrasi dalam mendapatkan pembangunan Zona Integritas.

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan Agama Tahun 2024 melalui DIPA Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000.- *(seratus juta rupiah)* berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2/Sek.01.W16-A1/PL1.1.5/I/2024, tanggal 2 Januari 2024.

Penyedia Jasa Konsultan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh "Perkumpulan Sahabat Hukum" Palangka Raya.

Dalam Tahun 2024 Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya telah memberikan layanan bantuan hukum sebanyak perkara sebagaimana rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Layanan Posbakum Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Perkara	Jam Layanan
1	Januari	160	85
2	Februari	204	86
3	Maret	92	81
4	April	66	82
5	Mei	139	85
6	Juni	160	86
7	Juli	97	83
8	Agustus	131	85
9	September	88	82
10	Oktober	67	81
11	November	101	82
12	Desember	90	82
Jumlah		1.395	1.000

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu (Sidang di Luar Gedung)

Tersedia alokasi anggaran DIPA Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sebesar Rp. 22.040.000,- (*Dua Puluh Dua Juta Empat puluh Ribu Rupiah*) untuk penyelesaian perkara melalui Sidang Keliling di luar gedung Pengadilan Agama Palangka Raya. Pada tahun 2024 terdapat 27 perkara yang diselesaikan melalui Sidang Keliling dan dilakukan di 6 Kelurahan yang berbeda yaitu Tumbang Rungan, Kereng Bangkirai, Kalampangan, Petuk Katimpun, Sabaru dan Tangkiling.

Tabel 2.15

Pelaksanaan Sidang Diluar Pengadilan Tahun 2024

Tanggal	Kelurahan	Jumlah Perkara
23/02/2024	Tangkiling	1
08/03/2024	Tumbang Rungan	1
15/03/2024	Kereng Bangkirai	4
21/03/2024	Petuk Katimpun	2
22/03/2024	Kereng Bangkirai	3
03/05/2024	Sabaru	1
17/05/2024	Kereng Bangkirai	2
31/05/2024	Tangkiling	1
12/06/2024	Tangkiling	1
14/06/2024	Kereng Bangkirai	2
19/07/2024	Kalampangan	1
12/07/2024	Kereng Bengkirai	2
02/08/2024	Tangkiling	1
21/08/2024	Tangkiling	1
13/09/2024	Kalampangan	1
11/09/2024	Kereng Bangkirai	1
06/09/2024	Petuk Katimpun	2
05/09/2024	Tangkiling	1
Jumlah		**27**





Gambar 2.2
Pelaksanaan Sidang Keliling

3. Perkara Prodeo

Upaya membantu masyarakat yang tidak mampu sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal beracara di Pengadilan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.150.000 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan target 10 perkara dan berhasil menangani perkara prodeo sebanyak 30 perkara (300 %). Hal ini dapat dilihat pada data tabel dibawah:

Tabel 2.16
Layanan Pembebasan Biaya Perkara

No	No Perkara	Jenis Perkara	Biaya Perkara
1	67/Pdt.G/2024/PA.Plk	Cerai Gugat	Rp. 520.000
2	71/Pdt.G/2024/PA.Plk	Cerai Gugat	Rp. 725.000
3	22/Pdt.P/2024/PA.Plk	Dispensasi Kawin	Rp. 370.000
4	24/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 220.000
5	25/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 320.000
6	26/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 320.000
7	27/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 320.000
8	28/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 320.000
9	29/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 370.000
10	30/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 320.000

11	31/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 300.000
12	32/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 200.000
13	90/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 300.000
14	33/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 200.000
15	34/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 300.000
16	35/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 200.00
17	36/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 200.000
18	37/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 200.000
19	38/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 200.000
20	39/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 200.000
21	40/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 100.000
22	43/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 125.000
23	44/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 125.000
24	45/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 125.000
25	47/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 125.000
26	48/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 125.000
27	49/Pdt.P/2024/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 375.000
28	91/Pdt.G/2024/PA.Plk	Cerai Gugat	Rp. 605.000
29	165/Pdt.G/2024/PA.Plk	Cerai Gugat	Rp. 300.000
30	469/Pdt.G/2024/PA.Plk	Cerai Gugat	Rp. 90.000,-
Jumlah		14 Perkara	Rp. 8.150. 000

Eviden / Bukti Pelaksanaan Perkara Prodeo





BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA

- Jl Kapten Piere Tendean No 2
- www.pa-palangkaraya.go.id
- pa_palangkaraya@yahoo.co.id
- (0536) 3221289

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia *Teknis Yudisial* dan Kesekretariatan terdiri dari unsur para pejabat fungsional Hakim, Kepaniteraan dan pejabat Kesekretariatan Pada Pengadilan Agama Palangka Raya berjumlah 28 (Dua puluh delapan) orang yang terdiri dari 6 orang pejabat Fungsional Hakim, 11 Orang pejabat Fungsional Kepaniteraan yang meliputi Panitera, Panmud, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti, 4 Orang Pejabat Struktural terdiri dari Sekretaris dan 3 Orang Kepala Sub Bagian, 1 orang Pejabat Fungsional, dan 6 Orang Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Sumber Daya Manusia (SDM)

NO	NAMA	GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS I.A				
1.	**Dr. YUSRI, S.Ag., M.H.**	IV/c	Ketua	S3
2.	**M. SA'DAN, S.AG.**	IV/c	Wakil Ketua	S1
3.	**Dra. Hj. ZURAIDAH HATIMAH, S.H., M.H.I.**	IV/d	Hakim	S2
4.	**DRA. HJ. IDA SARIANI, S.H., M.H.I.**	IV/d	Hakim	S2
5.	**Drs. H. AKHMAD BAIHAQI**	IV/d	Hakim	S1
6.	**DRS. H. MULYANI, M.H.**	IV/d	Hakim	S2
7.	**H. IMAN SAHLANI, S.AG.**	IV/a	Panitera	S1
8.	**Hj. SITI RUMIAH, S.H.I.**	III/d	Panitera Muda Hukum	S1
9.	**NOOR RASIMAH, S.H.**	III/d	Panitera Muda Gugatan	S1
10.	**HJ. MURSITIN, S.H.**	III/d	Panitera Muda Permohonan	S1
11.	**RAHSIANNOR SYAM`ANI, S.H.I.**	III/d	Panitera Pengganti	S1

12.	**MUHAMAD IKHWAN, S.AG., S.H., M.H.**	III/d	Panitera Pengganti	S2
13.	**EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.**	III/c	Panitera Pengganti	S1
14.	**HANIFAH AKHMAD, S.H.I.**	III/d	Juru Sita	S1
15.	**CITRA SALAWATY, S.H.**	III/d	Juru Sita	S1
16.	**ANNI SOFIA TAZKIANTI, S.H.**	III/d	Juru Sita	S1
17.	**NURIDAWATI**	III/b	Juru Sita Pengganti	SLTA
18.	**MISRAN, S.H.**	IV/a	Sekretaris	S1
19.	**SUWONDO, S.E.**	III/d	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	S1
20.	**MURNIWATI R. SAPUTRA, S.H.**	III/d	Kasubag.Umum dan Keuangan	S1
21.	**NORRACHMAD ARIYANTO, S.T., M.E.**	IV/a	Kasubag.Perencanaan, TI dan Pelaporan	S2
22.	**AHMAD FAUZI, S.T.**	III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1
23.	**RENANDA AGNA DEVITA SYAFITRI, S.Ak**	III/a	Operator – Penata Layanan Operasional	S1
24.	**NUNUNG SAPARINAH FATIMAH ARIANI, S.H.**	III/a	Klerek – Analis Perkara Peradilan	S1
25.	**HELENA NURUL AZMI, S.H.**	III/a	Klerek – Analis Perkara Peradilan	S1
26.	**HANA FAUZIAH, S.H.**	III/a	Klerek – Analis Perkara Peradilan	S1
27.	**SAPUTRI RIZKI RAMADHANTI, A.Md.Ak.**	II/c	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	D3
28.	**KHOTIB**	I/c	Pengelola Tata Persuratan	SLTA

Dalam kurun waktu satu tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 telah terjadi pergeseran penempatan sumber daya manusia baik di Pengadilan Agama Palangka Raya Berikut ini faktor yang

menyebabkan pergeseran tersebut :

A. MUTASI

Mutasi bagi Pegawai dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 dan selanjutnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019, tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Selama tahun 2024 Pengadilan Agama Palangka Raya melaksanakan mutasi sebagai berikut :

1. Mutasi Keluar dari wilayah Pengadilan Agama Palangka Raya

Selama tahun 2024 telah terjadi mutasi keluar wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 8 (delapan) orang pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Mutasi Keluar

NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT
1	2	3	4	5	6
1.	**Siti Fadiah,S.Ag, M.H.** **NIP. 197107121992032002**	IV/b	Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya Kelas IA	Wakil Ketua Pengadilan Agama Brebes Klas IA	09/07/2024
2.	**H. MUAMMAR, S.H.I., M.H.** **NIP. 198405262008051001**	III/d	Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya Kelas IA	Hakim Pengadilan Agama Bogor Klas IA	12/02/2024
3.	**Hamidi, SH.** **NIP. 196707011994021001**	IV/a	Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya Kelas IA	Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Klas IA	31/10/2024
4.	**Mardiana Indah, S. Ag** **NIP. 197407192000032002**	III/d	Panitera Muda Permohonan	Panitera Pengganti Pengadilan	31/10/2024

			Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	Tinggi Agama Palangka Raya Kalimantan Tengah	
5.	**Hj. E. SUPRIYATI, B.A.** **NIP. 196408201990022001**	III/d	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Denpasar Klas IA	13/05/2024
6.	**WANDITA PRAMESTHI, S.H.** **NIP. 199710152022032010**	III/a	Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	Cakim Pengadilan Negeri Pati Klas IA	05/02/2024
7.	**ABIANDRI FIKRI AKBAR, S.H.** **NIP. 199910152022031003**	III/a	Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	Cakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA	05/02/2024
8.	**LILIK SUMIYATI, A.Md** **NIP. 199709222020122007**	II/c	Arsiparis Terampil Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	Arsiparis Terampil Pengadilan agama Ngawi Klas IB	13/05/24

2. Mutasi ke dalam Wilayah Pengadilan Agama Palangka Raya

Selama tahun 2024 telah terjadi mutasi ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 10 (sepuluh) orang pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Mutasi Masuk

NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT
1	2	3	4	5	6
1.	**Drs. H. Mulyani, M.H.** **NIP. 196205081990031001**	IV/d	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Malang Klas IA	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	14/09/2023
2.	**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.** **NIP. 196806181993032007**	IV/d	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Jakarta Timur Klas IA	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	30/05/2024
3.	**Rahsiannor Syam`ani, S.H.I.** **NIP. 197605132003121008**	III/d	Panitera Pengadilan Agama Sampit Klas II	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	28/10/2024

4.	**M. Sa`Dan, S.Ag.** **Nip. 196803251999031001**	IV/c	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Klas IA	Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	01/11/2024
5.	**Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H.** **NIP. 197502262001121002**	IV/a	Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas Klas II	Panitera Pengganti Pengadilan Palangka Raya Klas IA	28/10/2024
6.	**H. Iman Sahlani, S.Ag.** **NIP. 197201211999031004**	IV/a	Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Klas IA	Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	28/10/2024
7.	**Hj. E. SUPRIYATI, B.A.** **NIP. 196408201990022001**	III/d	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Denpasar Klas IA	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	17/01/2024
8.	**Nunung Saparinah Fatimah Ariani, S.H.** **NIP. 199606202024052001**	III/a	-	CPNS Klerek – Analis Perkara Pengadilan Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	01/05/2024
9.	**Helena Nurul Azmi, S.H.** **NIP. 199908022024052001**	III/a	-	CPNS Klerek – Analis Perkara Pengadilan Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	01/05/2024
10.	**Hana Fauziah, S.H.** **NIP. 200011182024052002**	III/a	-	CPNS Klerek – Analis Perkara Pengadilan Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	01/05/2024

3. Mutasi Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan

Pada tahun 2024 telah terjadi mutasi kenaikan pangkat 1 (satu) orang pegawai untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel matrik dibawah:

a. Kenaikan Pangkat periode April (Reguler)

Pegawai yang naik pangkat periode April 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.5.
Kenaikan Pangkat Reguler periode tahun 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KENAIKAN PANGKAT		UNIT KERJA
			Dari	Ke	
-	-	-	-	-	-

b. Kenaikan Pangkat Pilihan periode Agustus (Pilihan).

Pegawai yang naik pangkat pilihan periode Agustus 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 3.6
Kenaikan Pangkat Pegawai Periode Oktober 204

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KENAIKAN PANGKAT		UNIT KERJA
			Dari	Ke	
1.	Renanda Agna Devita Syafitri, S.Ak. NIP. 199901302022032003	Operator - Penata Layanan Operasional	II/c	III/a	Pengadilan Agama Palangka Raya

B. PROMOSI

1. Promosi Keluar Pengadilan Agama Palangka Raya

Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) orang Pegawai yang mendapat Promosi jabatan keluar lingkungan Wilayah Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.7.
Promosi Keluar wilayah PA. Palangka Raya

(NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1.	**Mardiana Indah, S. Ag** **NIP. 197407192000032002**	III/d	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Kalimantan Tengah

2. Promosi Masuk ke wilayah Pengadilan Agama Palangka Raya.

Selama tahun 2024 telah terjadi promosi ke dalam Pengadilan Agama Palangka Raya dari luar wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 2 (dua)) orang pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Promosi Masuk wilayah PA. Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT
1	2	3	4	5	6
1.	**Rahsiannor Syam`ani, S.H.I.** **NIP. 197605132003121008**	III/d	Panitera Pengadilan Agama Sampit Klas II	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	28/10/2024
2.	**Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H.** **NIP. 197502262001121002**	IV/a	Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas Klas II	Panitera Pengganti Pengadilan Palangka Raya Klas IA	28/10/2024

3. Promosi dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya.

Selama tahun 2024 terdapat Promosi dalam wilayah Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 1 (satu) orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini:

Tabel 3.9.
Promosi dalam wilayah hukum PA. Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1.	**Hj. Mursitin, S.H.** **NIP. 96507071991032003**	III/d	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palangka Raya

C. PENSIUN

Pegawai yang pensiun pada Pengadilan Agama Palangka Raya untuk tahun 2024 sebanyak 2 (dua) orang mencapai batas usia pensiun,

dan tidak ada orang mengajukan Pensiun dini serta meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10.
Pensiun dalam periode tahun 2023

NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	**Drs. H. M. Azhari, M.H.I** **Nip. 195901021990031001**	IV/d	Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Palangka Raya
2.	**Mahli** **NIP. 196605061983031001**	III/b	Jurusita Pengganti Pengaidlan Agama Palangka Raya

D. DIKLAT (Teknis maupun Non Teknis)

Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian serta profesionalisme seluruh pegawai di Pengadilan Agama Palangka Raya baik diklat teknis maupun non teknis, setiap ada kesempatan Pengadilan Agama Palangka Raya selalu berupaya mengikutsertakan pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diklat yang telah diikuti sebagai berikut:

1. Diklat Teknis

a. Diklat Teknis Hakim dan Kepaniteraan

Pada tahun 2024 ini Pengadilan Agama Palangka Raya telah mengikutsertakan Hakim dan bagian Kepaniteraan untuk mengikuti diklat yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian. Adapun diklat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Contra Legem"

No	NAMA	NIP	SATKER	KET
1.	Dr. Yusri, S.Ag., M.H.	197110291998031001	PA Palangka Raya	sudah
2.	Muhamad Ikhwan S.Ag., S.H., M.H.	197502262001121002	PA Palangka Raya	Sudah
3.	Rahsiannor Syam`ani S.H.I.	197605132003121008	PA Palangka Raya	Sudah

Tabel 3.12
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama
"Perlawanan Eksekusi"

No	NAMA	NIP	SATKER	KET
1.	Dr. Yusri S.Ag., M.H.	197110291998031001	PA Palangka Raya	Sudah
2.	H. Iman Sahlani S.Ag.	197201211999031004	PA Palangka Raya	Sudah
3.	Hj. Siti Rumiah S.H.I.	197601051996032001	PA Palangka Raya	Sudah
4.	Hj. Mursitin S.H.	196507071991032003	PA Palangka Raya	Sudah
5.	Muhamad Ikhwan S.Ag., S.H., M.H.	197502262001121002	PA Palangka Raya	Sudah
6.	Rahsiannor Syam`ani S.H.I.	197605132003121008	PA Palangka Raya	Sudah
7.	Citra Salawaty S.H.	198212152007042001	PA Palangka Raya	Sudah
8.	Anni Sofia Tazkianti S.H.	198508242005022001	PA Palangka Raya	Sudah

Tabel 3.13
Diklat Teknis Hakim dan Kepaniteraan
Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

No	NAMA	NIP	SATKER	KET
1	Dr. Yusri S.Ag., M.H.	197110291998031001	PA Palangka Raya	Sudah
2	Drs. H. Mulyani M.H.	196205081990031001	PA Palangka Raya	Sudah
3	Drs. H. Akhmad Baihaqi	196709011993031010	PA Palangka Raya	Sudah
4	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah S.H., M.H.I.	196804141992032002	PA Palangka Raya	Sudah
5	H. Iman Sahlani S.Ag.	197201211999031004	PA Palangka Raya	Sudah
6	Hj. Siti Rumiah S.H.I.	197601051996032001	PA Palangka Raya	Sudah
7	Rahsiannor Syam`ani S.H.I.	197605132003121008	PA Palangka Raya	Sudah
8	Citra Salawaty S.H.	198212152007042001	PA Palangka Raya	Sudah
9	Anni Sofia Tazkianti S.H.	19760105 199603 2004	PA Palangka Raya	Sudah

Tabel 3.14
Diklat Teknis Hakim dan Kepaniteraan
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama
"Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)"

No	NAMA	NIP	SATKER	KET
1.	Dr. Yusri S.Ag., M.H.	197110291998031001	PA Palangka Raya	Sudah
2.	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah S.H., M.H.I.	196804141992032002	PA Palangka Raya	Sudah

3.	Hj. Siti Rumiah S.H.I.	197601051996032001	PA Palangka Raya	Sudah
4.	Muhamad Ikhwan S.Ag., S.H., M.H.	197502262001121002	PA Palangka Raya	Sudah
5.	Rahsiannor Syam`ani S.H.I.	197605132003121008	PA Palangka Raya	Sudah
6.	Anni Sofia Tazkianti S.H.	198508242005022001	PA Palangka Raya	Sudah

Tabel 3.15
Diklat Teknis Hakim dan Kepaniteraan
Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah"

No	NAMA	NIP	SATKER	KET
1.	Dr. Yusri S.Ag., M.H.	197110291998031001	PA Palangka Raya	Sudah
2.	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah S.H., M.H.I.	196804141992032002	PA Palangka Raya	Sudah
3.	Dra. Hj. Ida Sariani S.H., M.H.I.	196806181993032007	PA Palangka Raya	Sudah
4.	Hj. Siti Rumiah S.H.I.	197601051996032001	PA Palangka Raya	Sudah
5.	Anni Sofia Tazkianti S.H.	198508242005022001	PA Palangka Raya	Sudah

Tabel 3.16
Diklat Teknis Hakim dan Kepaniteraan
Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan

No	NAMA	NIP	SATKER	KET
1.	Dr. Yusri S.Ag., M.H.	197110291998031001	PA Palangka Raya	Sudah
2.	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah S.H., M.H.I.	196804141992032002	PA Palangka Raya	Sudah
3.	Hj. Siti Rumiah S.H.I.	197601051996032001	PA Palangka Raya	Sudah
4.	Rahsiannor Syam`ani S.H.I.	197605132003121008	PA Palangka Raya	Sudah
5.	Anni Sofia Tazkianti S.H.	198508242005022001	PA Palangka Raya	Sudah

Tabel 3.17
Diklat Teknis Hakim dan Kepaniteraan
Pembinaan Teknis Bidang Kepaniteraan PTA Palangka Raya dan PA se Kalimantan Tengah

No	NAMA	NIP	SATKER	KET
1.	Dr. Yusri S.Ag., M.H.	197110291998031001	PA Palangka Raya	Sudah
2.	Muhamad Ikhwan S.Ag., S.H., M.H.	197502262001121002	PA Palangka Raya	Sudah
3.	Rahsiannor Syam`ani S.H.I.	197605132003121008	PA Palangka Raya	Sudah

b. Diklat Sosialisasi untuk Sistem Laporan Keuangan Perkara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2024 mengirimkan peserta untuk mengikuti Sosialisasi Sistem Laporan Keuangan Perkara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna meningkatkan kemampuan dan wawasan guna menunjang tugas aparatur peradilan. Data lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.18
Diklat Sosialisasi Sistem Laporan Keuangan Perkara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
(tabel berikut contoh, agar disesuaikan/diedit)

No	NAMA	NIP	SATKER	KET
1.	H. Iman Sahlani S.Ag.	197201211999031004	PA Palangka Raya	Sudah
2.	Misran S.H.	197511101994011001	PA Palangka Raya	Sudah

2. Diklat Non Teknis

a. Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian, Pengadilan Agama Palangka Raya telah mengikutsertakan peserta untuk mengikuti Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel matrik dibawah ini :

Tabel 3.19.
Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	NAMA	NIP	SATKER	KET
1.	Dr. Yusri S.Ag., M.H.	197110291998031001	PA Palangka Raya	Sudah

b. Sosialisasi Administrasi Kepegawaian Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2024

Selain itu pada tahun 2024 Pengadilan Agama Palangka Raya akan mengikut sertakan 3 peserta untuk mengikuti Sosialisasi Administrasi

Kepegawaian Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2024. Adapun nama-nama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20.
Sosialisasi Administrasi Kepegawaian Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2024

No	NAMA	NIP	SATKER	KET
1.	Dr. Yusri S.Ag., M.H.	197110291998031001	PA Palangka Raya	Sudah
2.	Misran S.H.	197511101994011001	PA Palangka Raya	Sudah
3.	Rahsiannor Syam`ani S.H.I.	197605132003121008	PA Palangka Raya	Sudah

c. Webinar "Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian bagi pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya. Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Palangka Raya mengikutsertakan 2 (dua) orang peserta untuk mengikuti Webinar "Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.21.
Webinar "Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

No	NAMA	NIP	SATKER	KET
1.	Misran S.H.	197511101994011001	PA Palangka Raya	Sudah
2.	Rahsiannor Syam`ani S.H.I.	197605132003121008	PA Palangka Raya	Sudah

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA

- Jl Kapten Piere Tendean No 2
- www.pa-palangkaraya.go.id
- pa_palangkaraya@yahoo.co.id
- (0536) 3221289

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Agama Palangkaraya mendapatkan 2 (dua) DIPA yakni DIPA 01 Satker 402421 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 04 Satker 402422 (Badilag).

1. Satker 402421 (DIPA 01 Badan Urusan Administrasi)

Alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I. Adapun Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024 setelah dilakukan revisi terahir oleh eselon I, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi Belanja DIPA 01

Satker	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
PA. PALANGKA RAYA	5,838,494,000	5,581,460,928	95,60	257,033,027	4,4
-Belanja Pegawai	4,284,230,000	4.034.207.001	94,16	250,002,999	5,84
- Belanja Barang	1,554,264,000	1,547,253,927	99,55	7,010,073	0,45
- Belanja Modal	0	0	0	0,00	0,00

2. Satker 402422 (DIPA 04 Badilag)

Alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, meliputi komponen kegiatan sebagai berikut :

a. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara

b. Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan
c. Jasa Konsultan Bantuan Hukum

Realisasi Pelaksanaan Anggaran (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Realisasi Belanja DIPA 04

No	Satker Pengadilan Agama Palangkaraya	Pagu	Realisasi Kegiatan	Realisasi (%)	Sisa (%)
1	POSBAKUM	100.000.000	800 /OL	100.000.000 (100.00%)	0 (0,00%)
2	SIDANG KELILING (Sidang Luar Gedung)	22.040.000	30 Perkara	22.040.000 (100.00%)	0 (0,00%)
3	PRODEO	8.150.000	32 perkara	8.150.000 (100.00%)	0 (0,00%)
	TOTAL	130.190.000	-	130.190.000 (100.00%)	0 (0,00%)

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

I. Gedung Bangunan



Gambar 4.1

Tampak Depan Gedung Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu pada rapat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang diadakan pada tanggal 2 s.d. 4 April 1968 di Banjarmasin, dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa Madura;

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1968 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama.

Kendati Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada Tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi kantor terletak di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya dengan Luas Bangunan pertama kali seluas 200 M^2. Kemudian ada beberapa kali dilakukan rehabiltasi dan perluasan pada 2006 dilakukan rehabilitasi bangunan lama dan penambahan bangunan baru Tampak Depan dengan 2 lantai sehingga Luas Gedung Kantor menjadi 1.113 M^2.

Kemudian pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dilakukan rehabilitasi pembangunan menjadi 3 lantai dengan Luas Gedung Kantor menjadi 2.236 M^2 yang terdiri dari 2 lantai bagian depan dan 3 lantai bagian belakang termasuk tempat parkir dibagian lantai dasar bagian belakang gedung dengan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 660/735/DTK-P/IMB/2006, status bangunan tersebut telah ditetapkan penggunaannya (PSP) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-006/KM/06/WKN.12/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Mahkamah Agung RI yang digunakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, kode barang 4.01.01.01.001.1, Bangunan Gedung Permanen seluas 1.113 M^2. Bangunan Gedung Kantor Permanen didirikan di atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 2.005 M^2 (sesuai PSP oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor:

KEP.006/KM/06/WKN.12/2014 tanggal 5 Mei 2014) dengan sertifikat Hak Pakai No.15.01.01.03.4.02753 a.n Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

II. Rumah Dinas



Gambar 4.2
Tampak Depan Rumah Dinas Pengadilan Agama Palangka Raya

Rumah Negara Golongan I Type B Permanen (rumah dinas) berada di Jalan Damang Leman II No. 02, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan status telah ditetapkan penggunaannya (PSP) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 105/KM.6/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Mahkamah Agung RI, kode barang 4.01.02.01.004 dengan Luas Bangunan 122 M2 diatas Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dengan status PSP oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-006/KM/06/WKN.12/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Mahkamah Agung RI yang digunakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, kode barang 2.01.01.01.001.1, Tanah Bangunan Rumah

Negara Golongan I seluas 660 M2 dengan Sertifikat Hak Pakai No.738 a.n Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 4.3 Daftar Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
II	*PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA*					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√	-	-	

III. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas pada Pengadilan Agama Palangka Raya dapat dilihat pada Daftar Berikut:

Tabel 4.4 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Ket (Kode Barang)
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA						
I	JENIS KENDARAAN RODA 4					
1	Sedan (Toyota Vios) KH 8 AU Ex. KH 9 AU	02-01-2007	√	-	-	3020101001
2	Mini Bus (Toyota Inova) KH 1178AU -Ex.KH 1511 AU	30-05-2014	√	-	-	3020102003
3	Mini Bus (Toyota Avanza) KH1206AU	01-08-2012	√	-	-	3020102003
4	Station Wagon (Suzuki Carry) KH1751AU -Ex.KH816AU	31-12-2002	-	√	-	3020101003
II	JENIS KENDARAAN RODA 2					
1	HONDA NF125S KH3752AY	01-07-2006	√	-	-	3020104001.2
2	HONDA NF12A1C M/T KH5413AY	08-08-2012	-	√	-	3020101001.4

- **Pelaksanaan Lelang Penjualan BMN berupa Kendaran Bermotor Roda 2 Pada Pengadilan Agama Palangka Raya.**

JENIS KENDARAAN RODA 2 SEBELUM DILAKUKAN LELANG BMN						
No	Uraian	Tahun Perolehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kode Barang
1	**SUZUKI FD110 KH3366AY**	**31-12-1999**	**-**	**-**	√	**3020104001.1**
2	HONDA NF125S KH3752AY	01-07-2006	√	-	-	3020104001.2
3	**HONDA NF125SD KH3753AY**	**01-07-2006**	**-**	**-**	√	**3020101001.3**
4	HONDA NF12A1C M/T KH5413AY	08-08-2012	-	√	-	3020101001.4

Pada tanggal 26 Agustus 2024 dilaksanakan Lelang Penjualan BMN berupa 1 Paket Kendaraan Bermotor Roda Dua sebanyak 2 (Dua) unit motor yaitu Sepeda Motor NUP 1 merk Suzuki FD110 dengan plat Nomor KH 3366 AY dan Sepeda Motor NUP 3 Honda NF125SD dengan plat Nomor KH 3753 AY terjual dengan harga Rp 5.435.000,00 (Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Sehingga Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor Roda Dua yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 2 (dua) unit motor yaitu Sepeda Motor NUP 2 merk Honda NF125S dengan plat nomor KH 3752 AY dan Sepeda Motor NUP 4 merk Honda NF12A1C M/T dengan plat nomor KH 5413 AY.





Gambar 4.3
Pelaksanaan Lelang Penjualan BMN Kendaraan Bermotor Roda Dua
di Kantor PA Palangka Raya





Gambar 4.4
Penyerahan Barang Lelang BMN Kendaraan Bermotor Roda Dua kepada Pemenang Lelang

IV. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana Gedung Pada Pengadilan Agama Palangka Raya dan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Sarana dan Prasarana Gedung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA			
I	SARANA/PRASARANA GEDUNG		
1.	Ruang Kerja Ketua +WC (1 Unit)	1	
2.	Selasar Depan Ruang Ketua	1	
3.	Ruang Tunggu Tamu	1	
4.	Ruang Rapat Pimpinan	1	
5.	Ruang Perpustakaan	1	
6.	Ruang Mushola Pegawai	1	
7.	Ruang Kerja Panitera Pengganti	1	

8.	Ruang Kerja Juru Sita/JSP	1	
9.	Ruang Humas	1	
10.	Ruang Kerja Wakil Ketua & WC (1 Unit)	1	
11.	WC Jurusita/JSP (2 Unit)	2	
12.	Ruang Kerja Hakim Utama +WC	1	
13.	Ruang Penyimpanan Persediaan	1	
14.	WC Kesekretariatan (4 Unit)	4	
15.	Ruang Penyimpanan Alat Persediaan	1	
16.	Ruang Kerja Kesekretariatan (Kasubag Kepeg & Ortala, Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan dan Kasubag Umum dan Keuangan)	1	
17.	Ruang Kerja Sekretaris & WC (1 Unit)	1	
18.	Ruang Kerja Bendahara	1	
19.	R. Arsip Kesekretariatan	1	
20.	Ruang Server Komputer/IT	1	
21.	Ruang Media Center	1	
22.	Ruang Aula	1	
23.	Ruang Arsip Kepaniteraan	1	
24.	Ruang Tamu Terbuka Lantai 2	1	
25.	Ruang Pantry	1	
26.	Ruang Kerja Panitera Muda dan PP	1	
27.	Ruang Kerja Panitera & WC (1 Unit)	1	
28.	WC Kepaniteraan (2 Unit)	1	
29.	Ruang Kesehatan	1	
30.	Ruang Laktasi/Menyusui Anak	1	
31.	Toilet Umum/Pihak Dalam (2 Unit)	1	
32.	Toilet/WC Khusus Disabilitas	1	
33.	Ruang Tunggu Sidang 1	1	
34.	Ruang Sidang 1	1	
35.	Ruang Kontrol Sidang Online	1	

36.	Ruang Transit Sidang untuk Hakim	1	
37.	Ruang PTSP dan Lobby Pelayanan (Posbakum dan POS)	1	
38.	Ruang Sidang 2	1	
39.	Ruang Mushola Umum/Pihak	1	
40.	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	
41.	Ruang Gudang	1	
42.	Toilet/WC Pihak Umum	2	
43.	Ruang Genset	1	
44.	Ruang Mediasi 1	1	
45.	Ruang Mediasi 2	1	
46.	Ruang Tunggu/Bermain Anak	1	
47.	Parkir/Garasi Karyawan	1	
48.	Lobby/Teras/Halaman Tempat Parkir	1	

II	SARANA/PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN		
1.	Portable Water Pump	1	Rusak Ringan 1
2.	Kursi Roda	1	Baik 1
3.	Lemari Kayu	22	Baik 22
4.	Brandkas	2	Baik 2
5.	Tabung Pemadam Api	11	Baik 11
6.	Rambu-Rambu	1	Baik 1
7.	Papan Visual/Papan Nama	6	Baik 6
8.	Mesin Absensi	1	Baik 1
9.	LCD Projector/Infocus	1	Baik 1
10.	Mesin Antrian	1	Baik 1
11.	Perkakas Kantor Lainnya	1	Baik 1
12.	Meja Kerja Kayu	99	Baik 99

13.	Kursi Besi/Metal	160	Baik 160
14.	Kursi Kayu	20	Baik 20
15.	Sice	8	Baik 8
16.	Bangku Panjang Besi/Metal	18	Baik 18
21.	Meja Rapat	3	Baik 3
22.	Meja Komputer	6	Baik 6
23.	Tempat Tidur Besi	1	Baik 1
24.	Meja Resepsionis	1	Baik 1
25.	Kursi Fiber Glas/Plastik	20	Baik 20
26.	Jam Mekanis	1	Baik 1
27.	AC Split	11	Baik 11
28.	Kipas Angin	4	Baik 4
29.	Treng Air/Tandon Air	1	Baik 1
30.	Mixer	1	Baik 1
31.	Televisi	8	Baik 8
33.	Sound System	1	Baik 1
34.	Karaoke	1	Baik 1
36.	Microphone	2	Baik 2
37.	Unit Power Supply	1	Baik 1
38.	Camera Video	2	Baik 2
39.	Alat Hiasan	1	Baik 1
40.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Baik 1
41.	Dispenser	3	Baik 3
42.	Palu Sidang	2	Baik 2
43.	Lambang Instansi	3	Baik 3
44.	Asbak Tinggi	1	Baik 1
45.	Kabel	1	Baik 1
46.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Alat bantu Dengar)	1	Baik 1
47.	Audio Mixing Portable	1	Baik 1
48.	Audio Mixing Stationary	1	Baik 1
49.	Audio Monitor Active	4	Baik 4
50.	Microphone/Wireless Mic	3	Baik 3

51.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Baik 5
53.	Facsimile	1	Baik 1
54.	Genset	2	Baik 2
55.	Walker Polding	3	Baik 3
56.	Uninterupted Power Supply (UPS)	1	Baik 1
57.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik 1
58.	PC Unit	31	Baik 31
59.	Laptop	23	Baik 23
62.	Speaker Komputer	1	Baik 1
64.	Monitor	4	Baik 4
65.	Printer	15	Baik 15
66.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik 2
67.	Keyboard ((Peralatan Personal Komputer)	1	Baik 1
68.	Server	2	Baik
69.	Router	1	Baik 1
74.	Switch	1	Baik 1
75.	Peralatan Komputer Lainnya	14	Baik 14
76.	Monografi	108	Baik 108
77.	Majalah	3	Baik 3
78.	Software Komputer	2	Baik 1, Rusak Berat 1

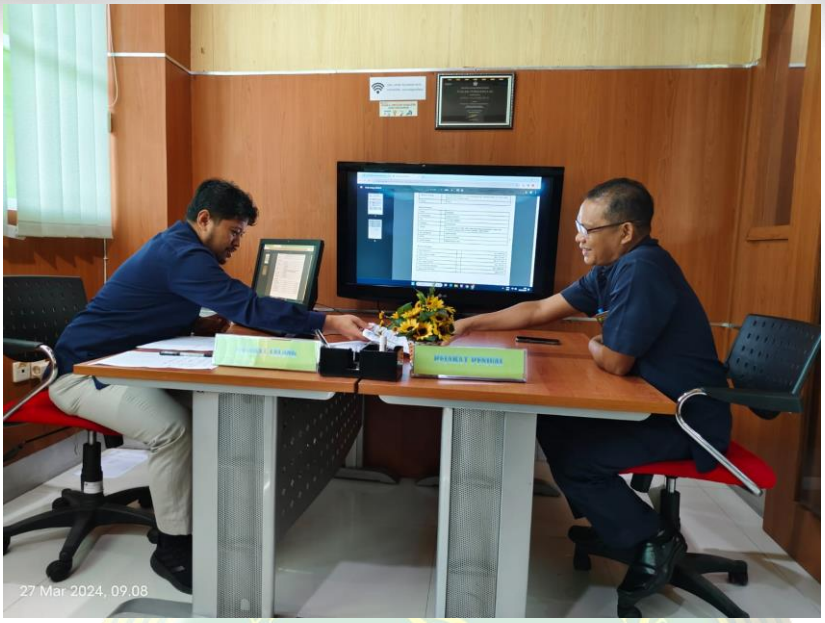
- **Pelaksanaan Lelang Penjualan BMN berupa Inventasris Kantor (Mebeleair dan Peralatan Mesin) Pada Pengadilan Agama Palangka Raya.**

Pada tanggal 27 Maret 2024 dilaksanakan Lelang Penjualan BMN berupa 1 Paket BMN berupa Inventaris dan peralatan mesin kantor sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) unit peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat dijual dalam satu paket yang terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci), 5 (lima) unit Lemari Kayu, 1 (satu) unit CCTV - Camera Control Television System, 1 (satu) unit LCD Projector/Infocus, 1 (satu) unit Focusing Screen/Layar

LCD Projector, 1 (satu) unit Meja Kerja Besi/Metal, 22 (dua puluh dua) unit Meja Kerja Kayu, 36 (tiga puluh enam) unit Kursi Besi/Metal, 11 (sebelas) unit Kursi Kayu, 3 (tiga) unit Jam Mekanis, 6 (enam) unit A.C. Split, 2 (dua) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit Loudspeaker, 1 (satu) unit Wireless, 6 (enam) unit Unit Power Supply, 4 (empat) unit Palu Sidang, 1 (satu) unit Telephone (PABX), 1 (satu) unit Uninterupted Power Supply (UPS), 19 (sembilan belas) unit P.C Unit, 6 (enam) unit Lap Top, 3 (tiga) unit Note Book, 1 (satu) unit Net Book, 1 (satu) unit CPU (Peralatan Personal Komputer), 1 (satu) unit Monitor, 14 (empat belas) unit Printer (Peralatan Personal Komputer), 2 (dua) unit Scanner (Peralatan Personal Komputer), 2 (dua) unit Server, 2 (dua) unit Router, 1 (satu) unit Hub, 2 (dua) unit Modem, 18 (delapan belas) unit Wireless PCI Card, 1 (satu) unit Wireless Access Point.

1 Paket BMN Inventaris sejumlah 177 unit BMN yang dilelang dengan nilai limit Rp 1.546.650,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) berhasil terjual dengan nilai Rp 6.546.650,00 (enam juta lima ratus puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Sehingga Barang Milik Negara berupa Inventaris dan Peralatan Mesin pada Pengadilan Agama Palangka Raya sebelum lelang sebanyak 724 unit BMN Peralatan Mesin Inventaris karena ada mutasi kurang karena penjualan lelang sebanyak 177 unit maka BMN peralatan dan mesin berupa inventaris dan meubleair yang ada sejumlah 547 unit BMN.





Gambar 4.5
Pelaksanaan Lelang Penjualan BMN Peralatan dan Mesin berupa Inventaris dan Meubelair di Kantor KPKNL Palangka Raya





Gambar 4.6
Penyerahan Barang Lelang BMN berupa Inventaris dan Mebleair kepada Pemenang Lelang

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

I. IMPLEMENTASI E-COURT PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA



Gambar 4.7.
Petugas E-Court

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara Elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan).

E-Court versi 2024 merupakan sistem terbaru yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan, Fitur Utama E-Court 2024:

1. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filling*)
2. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)
3. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)
4. Persidangan Elektronik (*e-Litigation*).
5. Taksiran biaya perkara secara otomatis (e-Skum)
6. Unduh Salinan Putusan secara Elektronik (e-Salinan)
7. Penandatanganan Dokumen secara elektronik (e-Sign)

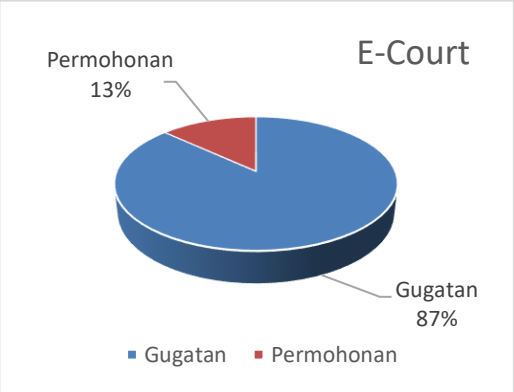
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait e-court tahun 2024 adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2024 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2024. SEMA Nomor 1 Tahun 2024 berisi pedoman penerbitan akta cerai dan salinan putusan secara elektronik di lingkungan peradilan agama.

E-court adalah sistem peradilan digital yang mencakup pendaftaran perkara secara elektronik (E-Filing), pembayaran perkara secara elektronik (E-Payment), pemberitahuan secara elektronik (E-Pbt), dan pemanggilan secara elektronik (E-Pgl).

Implementasi dan Evaluasi Per tanggal 9 September 2024, semua fitur dalam E-Court dijadwalkan untuk beroperasi 100%, sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan sistem informasi peradilan. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan memberikan masukan konstruktif untuk pengembangan lebih lanjut.

E-Court bertujuan untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik dalam sistem hukum Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan proses peradilan menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat diakses oleh masyarakat luas.

Inovasi ini merupakan langkah signifikan dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia, menjawab kebutuhan akan transparansi dan kemudahan akses bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.



Gambar 4.8.
Jumlah Perkara E-Court dalam Grafik

Selama Tahun 2024 Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA telah menerima perkara secara e-Court sebanyak 327 perkara, Putus e-Court 320 Perkara yang terdiri dari 283 Perkara Gugatan dan 43 Perkara Permohonan serta 1 Perkara Gugatan Sederhana.

Dalam rangka Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Palangkaraya, segenap langkah dan upaya baik dari segi internal maupun ekternal telah dilakukan.

Adapun bentuk upaya itu adalah:

A. Pemeliharaan sarana

Pemeliharaan e-court yang relevan bertujuan untuk Menjaga kinerja sistem e-court berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh Pengguna tanpa gangguan dan Perbaikan BUG atau kesalahan yang mungkin muncul dalam aplikasi sehingga pengalaman Pengguna menjadi lebih baik.

B. Sosialisasi E-Court

Pengadilan Agama Palangkaraya juga telah melaksanakan kegiatan Sosialisai E-Court untuk masyarakat melalui video informasi guna memaksimalkan peran e-court sebagai bentuk kemudahan layanan berperkara bagi masyarakat.

C. Penunjukan duta E-Court

Demi kemajuan Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Palangkaraya, sejak tanggal 16 Agustus 2019 telah dipilih DUTA E-Court Pengadilan Agama Palangkaraya yang saat ini ditunjuk sebagai Petugas Pojok E-Court pada Pengadilan Agama Palangka Raya. Diharapkan dengan dipilihnya Duta E-Court dapat menjadi penyemangat dalam rangka kemajuan progres Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Palangkaraya Kelas IA.



Gambar 4.9.
Pemilihan Duta E-Court PA Palangka Raya tahun 2019

II. IMPLEMENTASI SIPP PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA



Gambar 4.10
Launching dan Sosialisasi aplikasi ASEK PA Palangkaraya

Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perkara di pengadilan. Tujuan Implementasi SIPP meliputi Optimalisasi Arsip berkas perkara secara lebih efektif dan efisien sehingga memudahkan pencarian dan pengolahan data serta Meningkatkan Transparansi dalam proses peradilan.

Dukungan Teknologi Informasi (TI) pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Palangka Raya berfokus pada peningkatan sistem dan layanan untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan, berikut beberapa aspek penting dukungan TI yang diterapkan yaitu **Implementasi SIPP** terus diperbaharui dan ditingkatkan guna mempermudah akses informasi perkara bagi masyarakat dan pihak terkait, **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM** agar dapat melayani publik, **Peningkatan**

Infrastruktur TI perangkat keras & lunak untuk mendukung e-Court dan SIPP, **Integrasi Sistem** (e-Court dan SIPP) agar data dapat dikelola dengan lebih efisien dan meminimalisir duplikasi informasi, **Dukungan Layanan Publik** memungkinkan masyarakat dapat mengajukan keluhan/pertanyaan terkait pelayanan pengadilan secara online, serta **Monitoring dan Evaluasi** berkala terhadap penggunaan/efektivitas Sistem TI serta identifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Dengan dukungan TI yang kuat, Pengadilan Agama Palangka Raya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat proses peradilan di era digital ini.

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3748/SEK/TI1.1.1/IX/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Pemberitahuan Pembaharuan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.6.0 dan Aplikasi e-Court versi 6.0.0.

Adapun Persentase Rasio Penanganan Perkara yang terinput pada Aplikasi SIPP per tanggal 31 Desember 2024 mencapai Angka 99,35% (611/615 Perkara). Untuk mendukung implementasi SIPP, Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA menerapkan Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag sejak Bulan November 2019 ditambah dengan inovasi dari Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari:

APLIKASI PENDUKUNG INTERNAL

Sisa Tahun 2023 : 4 {LIHAT} | Masuk Tahun 2024 : 615
Putus Tahun 2024 : 611 | Minutasi Tahun 2024 : 611

BARU*

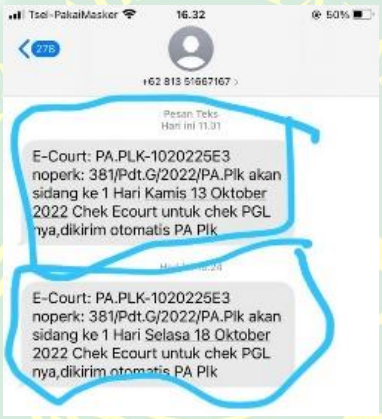
No.	Daftar Perkara	Sum	Lihat / Cetak	
1.	Sisa Belum Minutasi		{LIHAT}	{CETAK}
2.	Belum Minutasi >= 7 Hari		{LIHAT}	{CETAK}
3.	Sisa Perkara	50	{LIHAT}	{CETAK}
4.	Sudah Materai tapi belum Putus	0	{LIHAT}	{CETAK}
5.	Putus belum *upload* Dokumen Putusan	0	{LIHAT}	{CETAK}
6.	Perkara Belum BHT	0	{LIHAT}	{CETAK}
7.	Jumlah Sidang Hari Ini	2	{LIHAT}	
8.	Jumlah Sidang Besok	0	{LIHAT}	
9.	Jumlah Sidang Minggu Depan	0	{LIHAT}	
10.	Belum *upload* anonimmasi putusan	0	{LIHAT}	{CETAK}

Gambar 4.11
Keadaan Perkara pada aplikasi SIPP

Notifikasi Perkara

Aplikasi ini akan memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara kontinyu baik secara versi android maupun versi SMS. Aplikasi menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi

menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersumber dari data kependudukan dan nomor perkara sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada para pihak.



Gambar 4.12
Notifikasi Ecourt kepada pengguna

Media Center

Media Center ini digunakan sebagai sarana penunjang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja di lingkungan peradilan pertama baik tingkat pertama maupun banding. Selain itu fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja.



Gambar 4.12
Ruangan Media Center PA Palangka Raya

Aplikasi Gugatan Mandiri

Aplikasi Gugatan Mandiri ini berfungsi untuk memberikan Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan kepada masyarakat pencari keadilan. Disamping itu juga efisiensi waktu karena masyarakat tidak perlu antri dan datang ke Pengadilan Agama cukup dengan mengakses aplikasi gugatan mandiri melalui http://gugatanmandiri.badilag.net/ dan mengikuti setiap langkah yang akan disediakan oleh sistem.

Aplikasi APS Badilag

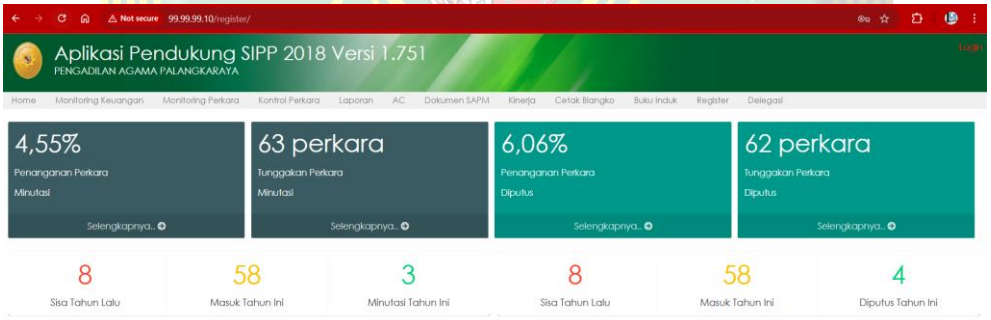
APS Badilag merupakan gabungan dari aplikasi pendukung SIPP yang terdiri dari 3 Aplikasi yaitu: Aplikasi E-Keuangan (Aplikasi yang memudahkan pencatatan transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran, serta memonitor dan mencetak laporan Keuangan);



Gambar 4.13
Aplikasi APS Badilag

Aplikasi E-Register

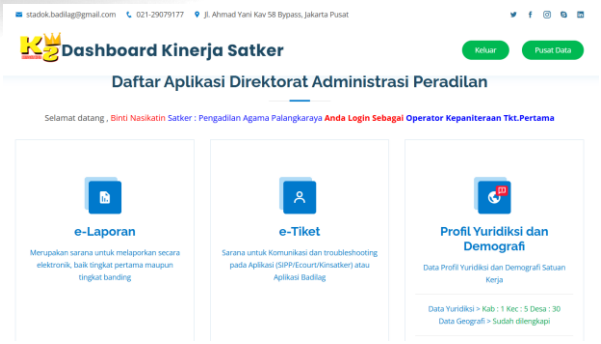
(Aplikasi E-Register memudahkan monitoring data perkara, pembuatan Register Elektronik, dan Validasi Harian Perkara); Aplikasi Blanko Tambahan SIPP (Aplikasi Blanko Tambahan SIPP membantu percepatan layanan di Peradilan Agama baik pada tahap Pendaftaran, Pembuatan Relaas, Pembuatan Berita Acara Sidang dan Pembuatan Putusan)



Gambar 4.14
Aplikasi E-Register

Kinsatker Badilag

Berfungsi sebagai wadah sumber data informasi Satker Peradilan Agama se-Indonesia, setiap satker diwajibkan mengisi data isian di Kinsatker http://kinsatker.badilag .net, meliputi data: Informasi Umum Satker Pengadilan; Laporan Perkara, Data PTSP, Laporan Data Dukung Keuangan, Inovasi, Prestasi, Laporan per-Triwulan, Laporan Semester, dan Monitoring.



Gambar 4.15
Aplikasi Kinsatker Badilag

Antrian Sidang ElektroniK

Aplikasi Antrian Sidang Elektronik (ASEK) ini merupakan aplikasi yang memberikan pembagian jadwal persidangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran secara online dan memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat sehingga diharapkan tidak terjadi antrian penjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan.

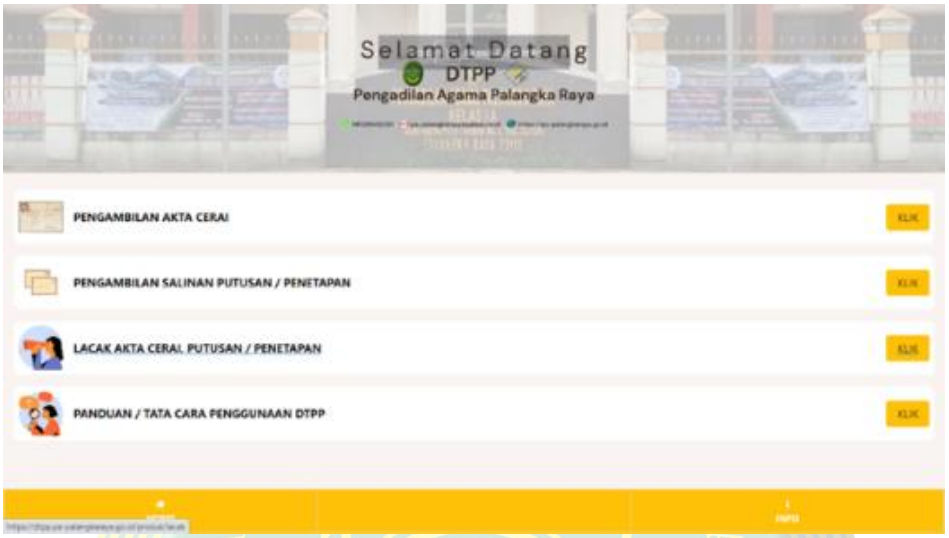


Gambar 4.16
Tampilan Awal Aplikasi ASEK

Drive Thru Pengambilan Produk

Aplikasi *Drive Thru* Pengambilan Produk (DTPP) ini merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi para pihak untuk dapat mengambil nomor antrian pengambilan produk pengadilan berupa Akta Cerai atau Salinan

Putusan secara online. Sehingga pada saat tiba pihak dapat langsung mengambil produknya tanpa harus menunggu terlebih dahulu melalui kendaraan pribadinya masing-masing.



Gambar 4.17
Tampilan Awal Aplikasi DTPP

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA

- Jl Kapten Piere Tendean No 2
- www.pa-palangkaraya.go.id
- pa_palangkaraya@yahoo.co.id
- (0536) 3221289

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Kepercayaan masyarakat adalah hal yang utama dalam memberikan pelaksanaan tugas dan wewenang dari suatu instansi pemerintah itu sendiri. Guna meningkatkan kepercayaan masyaraka terhadap Badan Peradilan tentang Pelayanan Publik yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pelayanan Publik wajib menyusun Standar Pelayanan Publik yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi pencari keadilan dan masyarakat. Standar Pelayanan Peradilan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap bidang/urusan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI dalam memberikan palayanan publik pada pencari keadilan dan masyarakat.

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 04.1/DJA/KS.00/SK/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Standar Pelayanan Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan ruang lingkup pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI meliputi:

1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan
2. Pelayanan pada Kesekretariatan
3. Pelayanan pada Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
4. Pelayanan pada Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama.

Pelayanan publik hakikatnya adalah pemberian pelayanan Prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban Aparatur Pemerintah sebagai Abdi Negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (KMPAN) No 63 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik setidaknya mengandung sendi-sendi:

1. Kesederhanaan; dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan; mencakup persyaratan teknis dan administratif Pelayanan Publik Unit Kerja yang berwenang dan bertanggung jawab serta rincian biaya atau tarif pelayanan public dan tata cara pembayaranya.
3. Kepastian waktu; yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Kemudahan akses; yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
5. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; yakni memberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
6. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja; peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

Pada dasarnya pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaran pemerintahan. Pelayanan publik dapat dijadikan tolak ukur keseriusan Pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat, artinya semakin baik kualitas pelayanan publik yang disuguhkan, maka semakin tinggi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan publik yang mengemban tugas dan kewenangan dari amanah Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya terus berbenah melakukan perbaikan dan inovasi peningkatan pelayanan publik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat berupa : Mal Pelayanan Publik (MPP) penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Inovasi Pelayanan Publik.

A. Mal Pelayanan Publik (MPP)

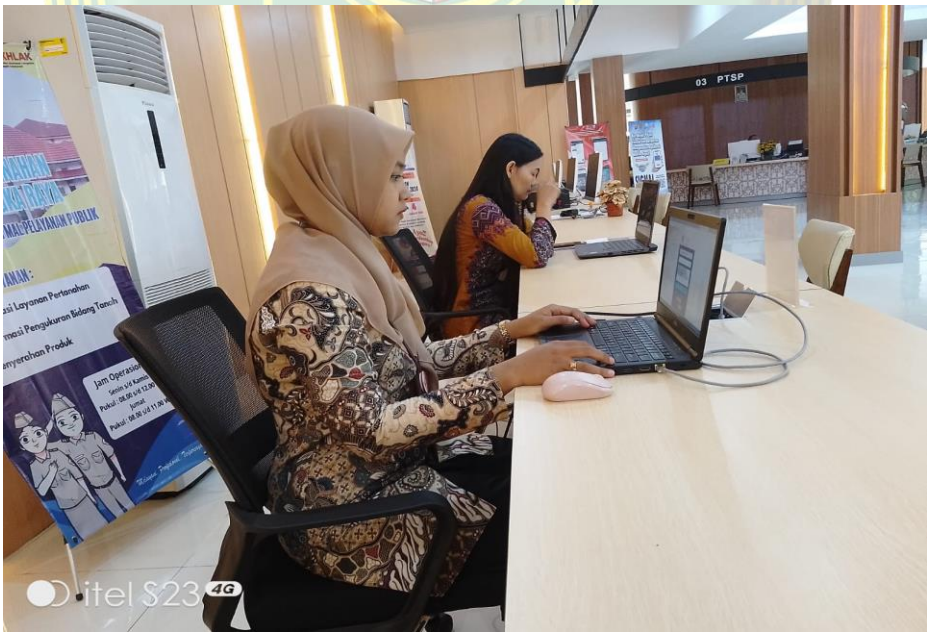
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang dimaksud Mal Pelayanan Publik yang selanjutnua disebut MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan;

Tujuan Penyelenggaraan MPP antara lain untuk meningkatkan daya saing global dan iklim investasi yang kondusif dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah, meningkatkan komitmen, kerjasama dan koordinasi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik, memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi, serta memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Selaras dengan tujuan dari MPP tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya dalam salah satu poin indikator kinerja utamanya yaitu meningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara serta terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Palangka Rayai hadir dan berpartisipasi di Mall Pelayanan

Publik HUMA BETANG yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 2 Kota Palangka Raya. Masyarakat pencari keadilan dapat langsung mendatangi MPP dan menuju ke Gerai Layanan Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mendapatkan layanan dari Pengadilan Agama Palangka Raya setelah mengambil antrian di pintu masuk MPP. Jam operasional Pengadilan Agama Palangka Raya buka setiap hari Senin-Kamis pukul 08.00-12.00 WIB.





Gambar 5.1
Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik PA Palangka Raya

B. Akreditasi Penjaminan Mutu Surveillance (APMS)– III di

Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2022 ditunjuk sebagai salah satu unit kerja yang diikutkan pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2020 oleh Tim Evaluator Kementerian Perbedayaan Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai perwakilan Kalimantan Tengah. Evaluasi ini merupakan upaya pengukuran sistematis unit kerja guna memperoleh indeks pelayanan publik di instansi pemerintahan. Kendati pada saat pengumuman Pengadilan Agama Palangka Raya belum terpilih sebagai salah satu yang terbaik, akan tetapi Pengadilan Agama Palangka Raya telah mengisi semua isian yang tersedia hingga pada waktu yang ditentukan secara tepat.

Pengadilan Agama Palangka Raya bertekad untuk memberikan layanan publik yang terbaik kepada masyarakat dengan berpedoman pada 8 (delapan) nilai utama Mahkamah Agung yaitu Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Resposibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan dan Perlakuan yang sama dihadapan Hukum, dengan menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dimana pada September 2018 Pengadilan Agama Palangka Raya memperoleh nilai "A Excellanct" sertifikat langsung diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya pada saat itu.

Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama mengacu pada 7 (tujuh) kriteria *Indoneisan Court Performance* (-) *Excellent (ICP-E)* meliputi Kepemimpinan (*Leadership*), Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*), Fokus Pelanggan (*Customer Focus*), Sistem Dokumen (*Document System*), Manajemen Sumber Daya (*Resources Management*), Manajemen Proses (*Process Management*) dan Hasil Kerja (*Performance Result*).

Sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor W16-A1/1473/OT.00/IX/2022 tentang Perubahan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya No : W16-A1/0408/OT.00/III/2022 tentang Susunan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 09 September 2022, Tim APM Pengadilan Agama Palangka Raya segera menginventarisir sesuai pemenuhan data LKE APM yang selanjutnya dilaksanakan Asesmen Internal di Lingkungan PA. Palangka Raya. Sebagai tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI No. 3682/DJA/HM.00/9/2021 tanggal 15 September 2022 perihal Input Data Asesmen Internal APM pada Apikasi PMPAPM, Pengadilan Agama Palangka Raya setelah melaksanakan Asesmen Internal (tanggal 1 s.d. 3 September 2022) kemudian melaksanakan penginputan data hasil asesmen pada aplikasi PMPAPM (http://pmpapm.badilag.net) sebelum 30 September 2022.

Pada akhir tahun 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Surat Nomor 4095/DJA.3/HM.00/9/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Perubahan Kegiatan Asesmen APM Tahun 2022. Pada pokoknya surat tersebut menyatakan bahwa Pelaksanaan Asessmen Akreditas Penjaminan Mutu tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Surat Direktur Jenderal Nomor 2862/DJA/H.M.00/9/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2022 dinyatakan tidak diperlukan lagi. Kendati demikian, Pengadilan Agama Palangka Raya telah menyelesaikan persiapan assessment tersebut sehingga data/eviden yang telah diunggah akan dimanfaatkan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan implementasi administrasi dalam mendapatkan pembangunan Zona Integritas.

C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan

Agama.Menyikapi aturan tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya telah membuat sebuah Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), meliputi layanan Informasi, Pendaftaran, Penyerahan Produk Pengadilan, Kasir, dan Pengaduan yang ditempatkan pada Lobi Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A.



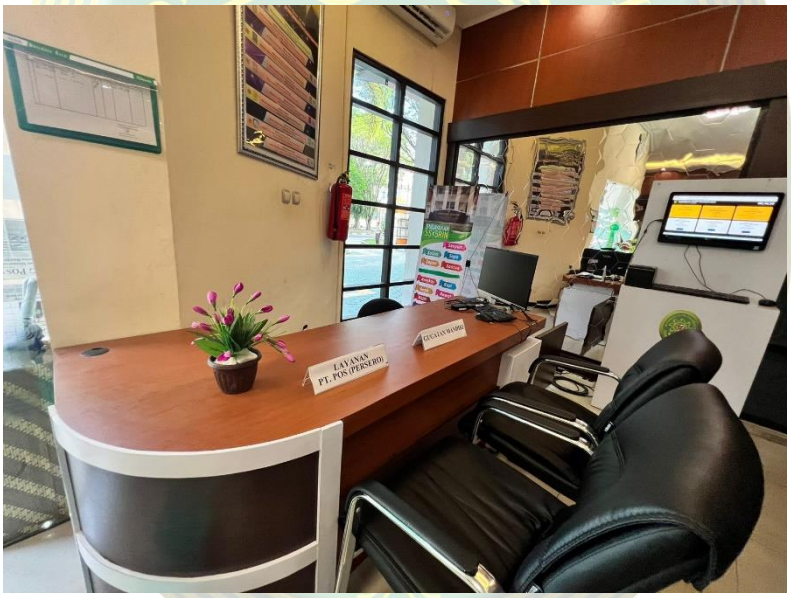
Gambar 5.2
Layanan PTSP PA. Palangka Raya



Gambar 5.3
Pembinaan PTSP di pimpin oleh Ketua PA Palangka Raya



Gambar 5.4
Layanan Posbakum



Gambar 5.4
Layanan Gugatan Mandiri Dan PT. Pos (Persero)

Lebih lanjut, selain melakukan perbaikan dari sarana dan prasarana pada bagian PTSP, Pengadilan Agama Palangka Raya membuat kebijakan adanya seragam bagi Petugas PTSP sehingga pelayanan dapat berjalan secara lebih maksimal dan bagian PTSP terlihat lebih elok bagi para pihak. **Mens Sana in Corpore Sano ,** dibalik jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat. Di balik PTSP yang prima ada petugas PTSP yang siap sedia memberikan pelayanan terbaik.

Bagi masyarakat.

Selanjutnya melalui SK Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 1378/KPA.W16-A1/HK2.6/9/2023 Tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PA Palangka Raya mengubah formasi petugas PTSP Berupa Petugas Loket 1,2,3 (Prioritas), Petugas Pembayaran, Petugas Informasi/Pengaduan, & Petugas Gugatan Mandiri/ E-Court. Dengan perubahan formasi ini diharapkan tidak ada lagi penumpukan pihak berperkara hanya di salah satu Loket. Petugas Loket 1,2 dan 3 memiliki tugas yang sama yaitu penerimaan pendaftaran perkara dan penyerahan produk pengadilan. Selain Itu PTSP PA Palangka Raya menerapkan sistem piket sehingga pelayanan dapat dilaksanakan tanpa terganggu dengan jam istirahat.



Gambar 5.5
Seragam Petugas PTSP Pengadilan Agama Palangka Raya

C. Inovasi Pelayanan Publik

Upaya memberikan pelayanan yang prima, kemudahan dan akses masyarakat dalam Pengadilan Agama Palangka Raya, saat ini terdapat ada beberapa inovasi yang telah dibangun sejak tahun 2022 baik secara Mandiri (Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A) maupun inovasi dari Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, terkhusus pada tahun 2022 Dirjen Badilag

melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 10 Agustus 2022. Pedoman pelaksanaan pelayanan ramah penyandang disabilitas ini memberikan arah kebijakan bagi pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Palangka Raya dalam melakukan inovasi yang mampu memberi manfaat khususnya bagi Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan pedoman tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya telah melakukan tindak lanjut melalui adanya pembuatan inovasi dalam beberapa hal, diantaranya:

1. Inovasi Mandiri (PA. Palangka Raya)

   a. Sarana Prasana

      Berkaitan dengan Sarana Prasarana, Pengadilan Agama Palangka Raya telah melakukan penambahan sarana dan prasarana khususnya bagi penyandang disabilitas yaitu *guiding block* bagi disabilitas rungu, tempat tidur beroda, kruk, tongkat sikn (Candigan), bangku lipat untuk shalat, kursi roda, alat bantu dengar, *rollator,* dan kotak P3K / kotak obat.








Gambar 5.6
Sarana Prasana Disabilitas

Selain itu PA Palangka Raya juga menyediakan ruang terbuka untuk merokok, ruang laktasi dan ruang terbuka khusus untuk merokok sehingga tidak mengganggu pengunjung lain yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya.






Gambar 5.7
Sarana Prasana Disabilitas



Gambar 5.8
Smoking Area

b. Layanan Pengadilan

Layanan di pengadilan agama terletak dari sejak pihak tiba di pengadilan, melakukan pendaftaran, mengikuti persidangan hingga pengambilan produk. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan inovasi guna memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat khususnya disabilitas melalui lahirnya layanan tambahan, yaitu:

1. KLIK (Kumpulan Link Aplikasi PA Palangka Raya

Guna mempermudah para pihak pencari keadilan tim IT PA Palangka Raya mengakomodir seluruh aplikasi layanan yang ada di PA Palangka Raya dalam satu aplikasi yaitu KLIK (Kumpulan Link Aplikasi PA Palangka Raya) dengan alamat aplikasi https://klik.pa-palangkaraya.go.id. Dalam aplikasi ini terdapat 9 aplikasi layanan Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu :

1. ASEK (Antrian Sidang Elektronik)
2. DTPP (Drive Thru Pengambilan Produk)
3. HPP (Hitung Panjar Perkara)
4. Sinorpa (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

5. Sivacer (Sistem Validasi Akta Cerai)
6. Sidudu (Sistem Informasi Kependudukan Terpadu)
7. SCIP (Scanning card informasi perkara)
8. MIO (Meja Informasi Online)
9. PTSP online



Gambar 5.9
Tampilan Aplikasi KLIK

2. Antrian Sidang ElektroniK (ASEK)

Antrian Sidang ElektroniK atau ASEK adalah layanan antrian secara online yang dapat diakses oleh pihak berperkara dari mana saja dengan keunggulan adanya fitu jenis kebutuhan khusus atau alat yang diperlukan oleh pihak (jika ia disabilitas) serta *live streaming* progres nomor antrian sidang guna memberikan ruang bagi pihak untuk menentukan waktu tiba di pengadilan.



Gambar 5.10
Aplikasi Antrian Sidang Elektronik (ASEK)



Gambar 5.11
Fitur Aplikasi Antrian Sidang Elektronik (ASEK)



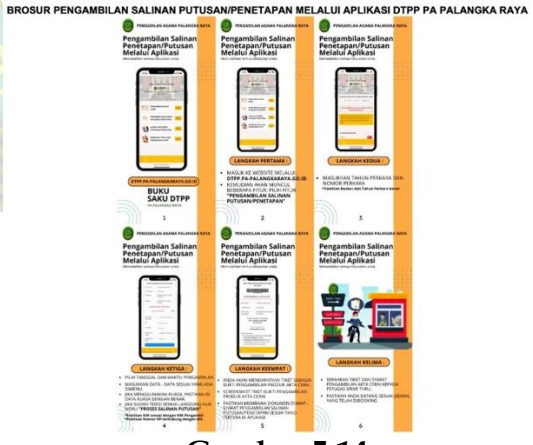
Gambar 5.12
Alur Kerja Aplikasi Antrian Sidang Elektronik (ASEK)

3. Drive Thru Pengambilan Produk (DTPP)

Drive Thru Pengambilan Produk atau DTPP adalah layanan pengambilan produk secara mudah bagi pihak tanpa harus meninggalkan kendaraannya dengan pengambilan antrian secara online. Melalui DTPP pihak kini tidak perlu masuk dan menunggu lama ke dalam PTSP untuk mengambil produk pengadilan.



Gambar 5.13
Aplikasi Drive Thru Pengambilan Produk (DTPP)



Gambar 5.14
Alur Penggunaan Aplikasi Drive Thru Pengambilan Produk (DTPP)

4. Kerja sama dengan PEKKA Cabang Palangka

Dalam rangka memberikan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat dan mempermudah akses informasi PA Palangka Raya hadir dalam pada acara KLIK (klinik layanan konsultasi dan informasi bergerak (mobile)) yang diselenggarakan oleh komunitas PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). Pengadilan Agama Palangka Raya memberikan layanan konsultasi bagi masyarakat yang ada di setiap kelurahan dimana acara tersebut dilaksanakan. Acara KLIK Sendiri dilaksanakan secara bergilir disetiap kelurahan yang masih menjadi wilayah yurisdiksi PA Palangka Raya.

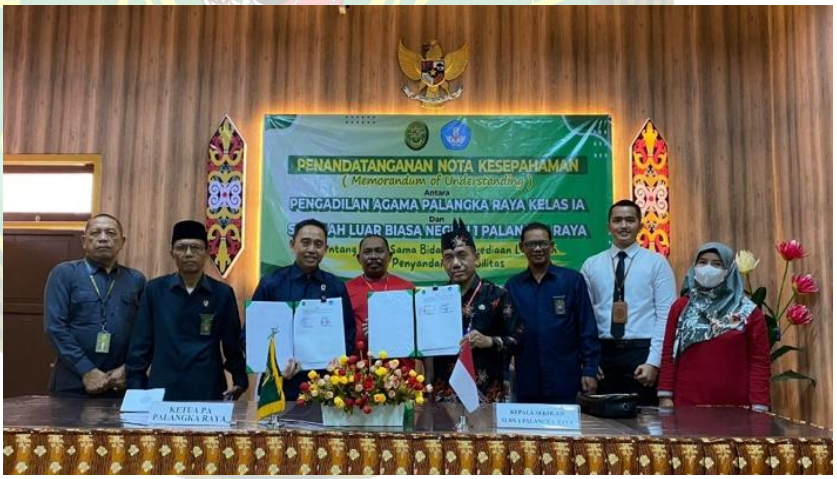
PEKKA atau Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga digagas pada akhir tahun 2000 sebagai bagian dari inisiatif Komnas Perempuan yang dikenal sebagai "Proyek Janda". PEKKA sendiri memiliki program yang disebut dengan KLIK (Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi) PEKKA, KLIK PEKKA melayani kebutuhan masyarakat yang memiliki kasus terkait perlindungan sosial seperti kartu keluarga (KK), tanda penduduk (KTP-el), akte lahir, buku nikah, BPJS, PKH,KIP , Pencatatan Perkawinan/ Perceraian dan lainnya.



Gambar 5.15
Acara KLIK PEKKA

5. Juru Bahasa Isyarat

Tindak lanjut Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memedomani pedoman dari badilag terkait pelayanan ramah bagi penyandang disabilitas salah satunya dilaksanakan melalui kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa 1 Palangka Raya (SLBN 1 Palangka Raya) tentang Kerja Sama Bidang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas. Dalam kerja sama tersebut SLBN 1 Palangka Raya sepakat untuk mendukung terselenggaranya pelayanan bagi disabilitas rungu khususnya melalui penyediaan juru bahasa isyarat atas dasar permintaan pihak serta pelatihan bahasa isyarat bagi petugas di Pengadilan Agama Palangka Raya.



Gambar 5.16
Penandatanganan MOU antara PA Palangka Raya dan SLBN 1 Palangkaraya



Gambar 5.17
Pembuatan Video Alur Layanan Bagi Penyandang Disabilitas Dengan Bahasa Isyarat

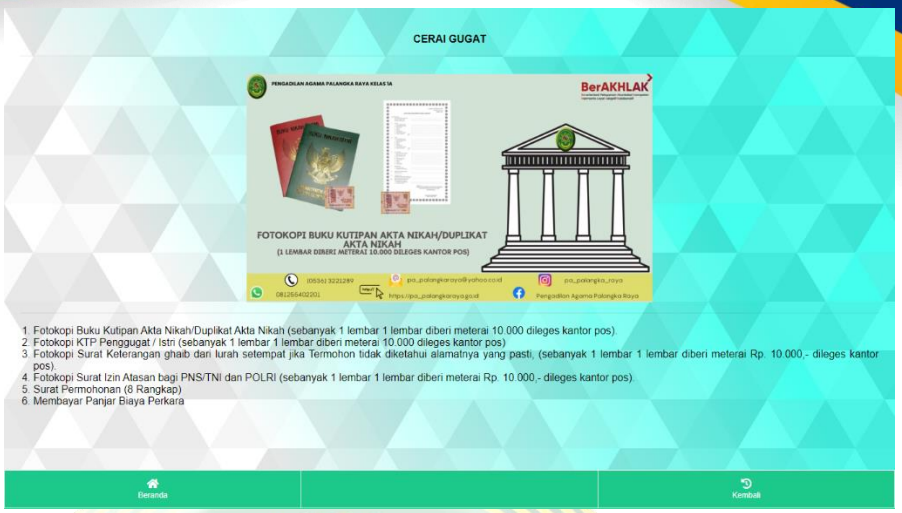


Gambar 5.18
Video Alur Layanan Bagi Penyandang Disabilitas Dengan Bahasa Isyarat

c. Media Informasi

1. SINORPA

Pelayanan yang ditingkatkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya bagi masyarakat juga mencakup pemberian layanan informasi secara digital dalam bentuk audio visual agar lebih mudah dipahami oleh pencari keadilan. Guna memberikan manfaat lebih diantaranya video tersebut telah ditambahkan juga dengan Juru Bahasa Isyarat sehingga pihak disabilitas rungu dapat memahami video tersebut.



Gambar 5.19
Aplikasi SINORPA

2. PODCAST PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (PODS PAPA)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyaraklat pencari keadilan khusunya mengenai mempermudah akses informasi Agen Perubahan PA Palangka Raya mengembangkan channel yoiutube dengan memberikan konten podcast yang informatif. Pada konten Podcast PA Palangka Raya sendiri mengusung tema atau topik yang sangat relevan bagi pencari keadilan. Hal – hal yang selama ini menjadi pertanyaan bagi para pihak di kemas dan dijawab dalam bentuk podcast itu sendiri. Narasumber dari podcast ini sendiri terdiri dari hakim – hakim yang ada di PA Palangka Raya. Podcast Pengadilan Agama Palangka Raya sudah ada 3 episode hingga bulan desember 2023 ini.



Gambar 5.20
Podspapa Episode 3

d. Administrasi Kantor

Inovasi Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2022 tidak hanya terfokus pada pelayanan pada masyarakat, melainkan juga peningkatan dalam berbagai aspek termasuk tata kelola administrasi kantor agar penyelenggaraannya mampu berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu, dipenghujung tahun 2022 Pengadilan Agama Palangka Raya meluncurkan aplikasi **Sistem Administrasi Pengadilan Agama Berbasis Otentifikasi (SAPA-BRO).**

Aplikasi ini merupakan pengembangan dari Tim IT Pengadilan Agama Palangka Raya atas masalah belum efektifnya alur persuratan di kantor. Di mana pada tahun 2022 aplikasi ini hanya digunakan untuk penomoran surat secara online dan terintegrasi melalui Sistem aplikasi ini penomoran surat, surat masuk dan keluar, disposisi, serta berbagai hal lainnya terkait dengan administrasi kantor akan diintegrasikan melalui aplikasi ini.

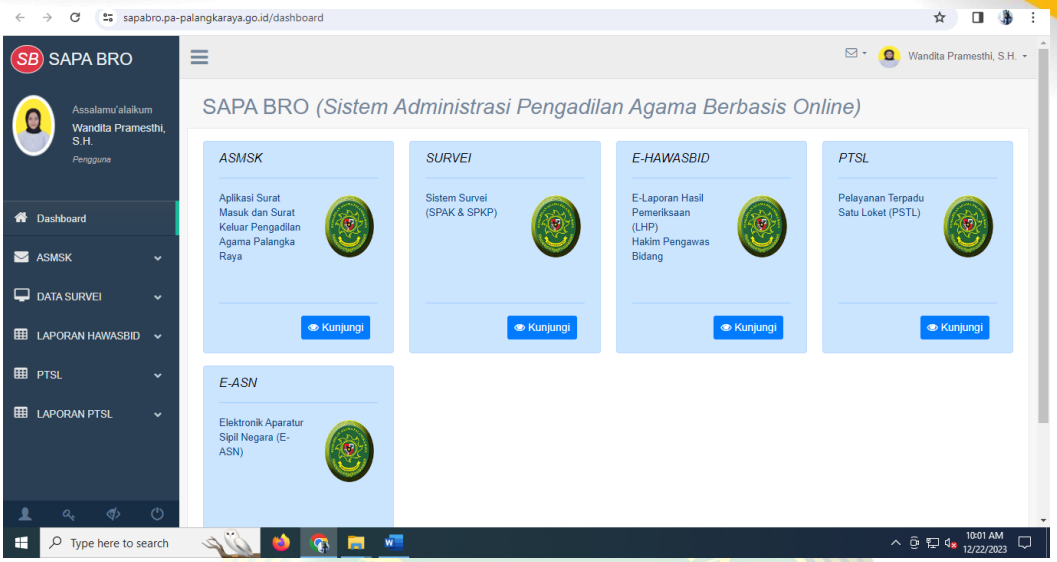
Tahun 2023 Tim IT Pengadilan Agama Palangka Raya selanjutnya mengembangkan aplikasi ini bukan hanya sebagai sarana persuratan namun lebih dari itu. Pada bulan September Sapa BRO resmi menambahkan 2 fitur yaitu PTSL Layanan PTSL (Pelayanan Terpadu Satu Loket) Sendiri adalah upaya pengembangan pada PTSP yang terintegrasi dengan SIPP sehingga satu loket bisa melayani semua yang ada di PTSP Yaitu berupa Layanan Informasi & Pengaduan, Layanan Pendaftaran e-court/ manual, Layanan Kasir serta Layanan Penyerahan Produk. Fitur kedua yaitu E-Hawasbid dimana setiap laporan hasil pengawasan di input pada menu tersebut sehingga dapat di akses kapanpun dan terorganisir.

Selanjutnya akan ditambahkan 2 menu tambahan lagi yaitu e-ASN dan Survey namun masih dalam proses pengembangan. Diharapkan dengan lahirnya aplikasi SAPA-BRO kedepannya Pengadilan Agama Palangka Raya mampu mengintegrasikan semua sistem aplikasinya seperti ASEK (Antrian Sidang ElektroniK), DTPP (*Drive Thru* Pengambilan Produk), SIPACER, dan lain sebagainya.



Gambar 5.21

Aplikasi SAPABRO



Gambar 5.22
Tampilan Aplikasi SAPABRO

2. Inovasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

a. Sistem Aplikasi Cuti Online (SIACUN)



Gambar 5.23
Aplikasi SIACUN

b. Aplikasi Sistem Informasi Banding (SI-ADING)



Gambar 5.24
Aplikasi SI-ADING

3. Inovasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Implementasi atau pelaksanaan dari 11 (sebelas) aplikasi inovasi Ditjen Badilag MA-RI di Pengadilan Agama Palangka Raya berupa Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Produk Pengadilan, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Basi Data Terpadu Kemiskinan, Command Center, Aplikasi PNBP Fungsional, Aplikasi E-Eksaminasi, Aplikasi E-Register, Aplikasi E-Keuangan, Aplikasi Validasi Akta Cerai, dan Aplikasi Gugatan Mandiri.

Untuk 6 (enam) dari 11 (sebelas) aplikasi yang merupakan inovasi Ditjen Badilag di ruang Command Center Mahkamah Agung RI, diluncurkan saat pembukaan rapat koordinasi Ditjen Badilag MA-RI dan Pengadilan Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama dengan dukungan Kamar Agama Mahkamah Agung RI oleh Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. di ruang Command Center Mahkamah Agung RI pada hari Selasa, 2 Maret 2021. Berikut sekilas tentang

6 aplikasi tersebut:

a. Pusat Data Perkara; Inovasi ini adalah pengembangan dari pusat data yang telah diluncurkan sebelumnya. Manfaatnya sebagai media informasi dengan menyajikan data-data perkara di peradilan agama dalam bentuk statistik maupun grafis.
b. Portal Ekonomi Syariah; portal ini menyediakan informasi yang lengkap dan terbaru terkait penanganan dan regulasi perkara ekonomi syariah.
c. Aplikasi PTSP Online Pengadilan Tingkat Banding; merupakan pengembangan dari PTSP Online Badilag yang bermanfaat untuk memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi prosedur dan layanan di pengadilan agama.
d. Aplikasi Penilaian APM (Akreditasi Penjamin Mutu); aplikasi ini digunakan untuk memantau dan mengukur konsistensi penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan peradilan agama.
e. Laporan Elektronik (E-Laporan); aplikasi untuk proses pelaporan antar instansi pusat dan daerah sehingga menjadi lebih cepat dan akurat.
f. Aplikasi Virtualisasi Surat Izin Online (Vision+) Satuan Kerja di lingkungan Peradilan Agama; merupakan versi terbaru dari aplikasi yang diluncurkan sebelumnya. Aplikasi ini berguna untuk memperpendek jalur birokrasi dalam proses perizinan bagi aparatur di lingkungan Peradilan Agama.



Gambar 5.25
11 Inovasi Aplikasi BADILAG MA-RI

BAB VI

PENGAWASAN

Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA

- Jl Kapten Piere Tendean No 2
- www.pa-palangkaraya.go.id
- pa_palangkaraya@yahoo.co.id
- (0536) 3221289

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencanan dan aturan yang berlaku berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung RI ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh informasi penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan (mal-administrasi) dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan, serta penilaian kinerja.

Tujuan Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Fungsi Pengawasan meliputi Menjaga agar pelaksanaan tugas

Lembaga Peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah.

Bentuk Pengawasan yang dilaksanakan terdiri atas Pengawasan Langsung (melakukan pemeriksaan) dan Pengawasan Tidak Langsung (melakukan Pengujian atau Penilaian atas Laporan isi dokumen). Pengawasan yang dilakukan berpegang pada prinsip-prinsip Independensi, Objektivitas, Kompetensi, Formalistik, Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi, Efisien, Efektif dan Ekonomis. Pelaksanaan Pengawasan dilakukan meliputi:

1. Pengawasan Rutin/Reguler; dilakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yaitu:
   a. Pelaksanaan Tugas Pokok di Lingkungan Kepaniteraan yang mencakup Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara.
   b. Pelaksanaan Tugas Pokok di Lingkungan Kesekretariatan yang mencakup Administrasi Kepegawaian, Keuangan (*current audit*), Investasi dan Administrasi Umum lainnya.
   c. Evaluasi atas Penyelenggaraan Manajemen Peradilan, Kepemimpinan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Pengawasan Keuangan:
   a. *Current Audit* yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan Pihak Ketiga yang sedang berjalan dimana merupakan bagian dari Pengawasan Reguler/Rutin.

b. *Post Audit* yaitu pemeriksaan dan review atas Laporan Realisasi APBN dan Neraca.

3. Penanganan Pengaduan yaitu pengawasan terhadap tingkah laku Aparat Lembaga Peradilan, Manajemen dan Kepemimpinan Lembaga Peradilan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas Pelayanan Publik Lembaga Peradilan

Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya diselenggarakan melalui apel pagi Senin dan apel sore Jum'at, rapat-rapat koordinasi, rapat bagian, serta evaluasi secara berkala. Untuk masing-masing bagian seperti Bidang Kepaniteraan, Panitera melakukan monitoring evaluasi terhadap Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/JSP, serta Bidang Kesekretariatan, Sekretaris melakukan evaluasi kepada Kepala Sub Bagian dengan hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Pimpinan pada rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Sebagai tindaklanjut dari SK MA-RI No. KMA/080/SK/VIII/2006 dan No. KMA/006/SK/III/1994, dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya No. 1504/KPA.W16-A1/PW1.1/XI/2023 Tanggal 20 November 2023 Tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya. Dimana seluruh ASN Pengadilan Agama Palangka Raya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diawasi Hakim Pengawas Bidang PA Palangka Raya, Hakim Pengawas Daerah PTA. Palangka Raya dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dengan harapan seluruh tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya dapat berjalan sesuai dengan tujuan visi, misi dan kebijakan Mahkamah Agung RI.

Pengawas Internal (Hakim Pengawas Daerah) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A pada tanggal 11 melalui aplikasi ebinwas (Zoom Meeting), berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Palangka Raya No. 1238/KPTA.W16-A/ST.HM.3.1.2/X/2024, Tanggal 21 Oktober 2024, serta melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Adapun Tim yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Palangka Raya adalah:

a. Dra. Rusmulyani, M.H. (Ketua)
b. Dra. Aisyah (Anggota)
c. Puji Rahayu, S.H. (Anggota)



Gambar 6.1

Hakim Tinggi dan Tim BinWas PTA Palangka Raya memberikan sambutan

Dalam Ekpose disampaikan bahwa secara garis besar Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A sudah mengalami peningkatan, dimana dari berbagai aspek baik, Pencanangan Zona Integritas (WBK/WBBM), Administrasi Perkara dan Kesekretariatan sudah terpenuhi.

Namun ada 5 (lima) temuan, dan alhamdulillah sekarang semua temuan tersebut sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti.



Gambar 6.2
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan reguler selain dilaksanakan oleh Tim BinWas PTA. Palangka Raya, Tim BinWas Intern juga dilaksanakan oleh Hakim PA. Palangka Raya yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya No. 0914/KPA.W16-A1/PW1.1/VII/2024 Tanggal 04 November 2024 Tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya, yang terdiri-dari:

TABEL 6.1
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PA. PALANGKA RAYA

NO	NAMA	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1	M. Sa'dan, S.Ag.	Wakil Ketua	Koordinator Hakim Pembina dan Pengawas Bidang
2	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah , S.H., M.H.I.	Hakim Utama Muda	• Manajemen Peradilan • Administrasi Persidangan
3	Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.	Hakim Utama Muda	Administrasi Perkara
4	Drs. Akhmad Baihaqi	Hakim Utama Muda	Administrasi Kesekretariatan
5	Drs. H. Mulyani, M.H.	Hakim Pratama Utama	Manajemen Pengaduan Kinerja Pelayanan Publik

Dalam Periode tahun 2024 Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya telah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di masing-masing bidang setiap Triwulan.



Gambar 6.3
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang PA Palangka Raya

B. EKSTERNAL

Pada Tahun 2024, PA Palangka Raya tidak kedatangan pengawas dari pihak eksternal Mahkamah Agung.

C. EVALUASI

Proses terakhir dalam kegiatan organisasi adalah penilaian atau evaluasi. Dengan melakukan penilaian, dapat diketahui efektivitas setiap kegiatan organisasi serta dapat diketahui kelemahan dan kelebihan selama berlangsungnya proses administrasi. Kelemahan yang ada dapat ditanggulangi dan kelebihannya dapat dipertahankan. Selain itu, dapat diketahui apakah rangkaian seluruh kegiatan dalam organisasi telah sesuai dengan capaian tujuan yang diharapkan.

Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Pengawasan yang telah dilakukan baik yang bersifat melekat maupun fungsional, seyogyanya memberikan hasil positif akan perubahan, kemajuan serta peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi apabila pengawasan tersebut tidak ditindaklanjuti atau tidak dilakukan evaluasi terhadap pokok yang menjadi permasalahan, tentu hal itu tidak akan membuat perubahan kearah yang positif sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, melalui evaluasi maka dapat diketahui capaian output kegiatan dari target yang dicanangkan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan, salah satu tujuan

evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran (output) dan outcome dari kebijakan.

4. Mengukur dampak suatu kebijakan, pada level tertentu, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan (dampak positif/negatif)
5. Deteksi kebijakan apabila terjadi penyimpangan dan/atau kekeliruan.
6. Input/referensi dalam penetapan kebijakan di masa mendatang, tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar lebih baik.

Mengingat akan pentingnya sebuah evaluasi, lebih-lebih terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan baik oleh aparat yang bersifat melekat maupun fungsional, maka setiap hasil dari pengawasan, ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Palangka Raya melalui mekanisme evaluasi berkesinambungan dalam menyelesaikan semua hasil temuan dari pengawasan. Evaluasi atas hasil temuan pengawasan tidak hanya dilakukan dengan membuat laporan tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan, namun di implementasikan perubahannya dalam praktik pelaksanaan tugas sehari-hari sebagaimana rekomendasi yang telah diberikan, karena apapun bentuk pengawasan yang dilakukan, kami merasakan dapat memberikan kontribusi baik untuk kemajuan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A di masa mendatang.

BAB VII

PENUTUP

Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA

- Jl Kapten Piere Tendean No 2
- www.pa-palangkaraya.go.id
- pa_palangkaraya@yahoo.co.id
- (0536) 3221289

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sepanjang Tahun 2024 Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA telah berupaya optimal memberikan layanan proses peradilan yang "sederhana, cepat dan ringan" sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu upaya pembekalan dan peningkatan kinerja manajemen peradilan terus dilakukan guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA yang pada titik akhirnya akan bermuara pada Visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

Tahun 2024 Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA telah memutus perkara sebanyak 611 (607 Perkara tahun 2024 dan 4 perkara tahun 2023) atau setara dengan 99,34% dari 615 Perkara yang harus diselesaikan. Dari 611 perkara yang diselesaikan terdiri dari 504 perkara gugatan atau setara 82,49 % dan 107 perkara permohonan atau setara 17,51 %. Dari 615 perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 327 perkara atau 53,17% diterima melalui e-Court. Seluruh perkara yang diputus tahun 2024 (610 perkara) telah dipublikasi dan diminutasi pada hari yang sama dengan hari putus (one day publish, one day minute).

Lebih lanjut, realisasi anggaran tahun 2024 untuk DIPA 01 mencapai Rp 5,581,460,928,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) atau setara 95.60% dari total pagu Rp 5,838,494,000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Adapun untuk DIPA 04 realisasi mencapai Rp 130.190.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setara 100 % dari total pagu Rp 130.190.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Berkaitan dengan SDM, selama tahun 2024, di Pengadilan Agama Palangka Raya terlaksana Mutasi Masuk sejumlah 10 orang pejabat/aparatur dan Mutasi Keluar sejumlah 8 orang pejabat/ aparatur serta pegawai pensiun sejumlah 2 orang pejabat/aparatur. Sehingga kondisi pada 31 Desember 2024 di Pengadilan Agama Palangka Raya terdapat 28 orang pejabat dan aparatur serta 11 orang PPNPN, dengan Jabatan Struktural dan Fungsional yang seluruhnya telah terisi.

Upaya mendorong Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dan masyarakat bersih dari praktek-praktik KKN terhadap pemberian layanan kepada masyarakat pencari berkeadilan terus dilakukan, hal ini dibuktikan dengan sejak akhir Tahun 2018 telah dicanangkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Keberhasilan pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran dari tenaga PPNPN, Pelaksana, Pejabat Struktural / Fungsional serta Pimpinan yang bekerja sama saling mendukung untuk memberikan kinerja terbaik, sekalipun tidak luput dari kendala- kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal, terutama kurangnya tenaga hakim dan jurusita serta pelaksana administrasi.



B.Rekomendasi

Dalam rangka upaya mewujudkan peningkatan penyelenggaraan aparatur negara, terkait Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pendukung lainnya di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan layanan, rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, sangat diperlukan fasilitas pendukung berupa sarana prasarana gedung yaitu berupa pendingin ruangan (AC) pada tempat ruangan pelayanan seperti ruang tunggu sidang, ruang sidang utama (aula), ruang laktasi/bermain anak, mushalla ASN & Pengunjung Sidang. Pengamanan Pagar Halaman Gedung Kantor untuk beberapa sisi kiri/kanan/belakang masing ikut dengan Pagar tetangga kantor, sehingga rawan walaupun dibeberapa titik telah terpasang CCTV.
2. Dalam upaya peningkatan dan penguatan SDM, Pimpinan terus mendorong Aparatur untuk mengikuti kegiatan pelatihan/bimtek, baik yang diselenggarakan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, maupun PTA. Palangka Raya terkait Kesekretariatan maupun Kepaniteraan dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta yang tidak kalah penting diklat bagi Hakim Pengawas Bidang, agar Pembinaan dan Pengawasan dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Diperlukan tenaga IT yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maupun tenaga honor, karena setiap Pegawai maupun tenaga honor dituntut untuk dapat menguasai Teknologi Informasi, mengingat di zaman era teknologi semua line pekerjaan telah menggunakan teknologi informasi.

PIAGAM PENGHARGAAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA

PIAGAM
PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Atas prestasi sebagai "**Terbaik II**" dengan kategori **Implementasi dan Kelengkapan Data Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI**
Pada Penilaian Pengadilan Agama Yang Berkinerja Terbaik Se-Kalimantan Tengah
Tahun 2023.

Palangka Raya, 29 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya,

Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.
NIP. 195807081984031002





MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

1

PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Atas Prestasinya Sebagai
"Terbaik Peringkat I"
Kategori Validasi dan Akurasi Data Keuangan Perkara
Pada Penilaian Kinerja Terbaik Pengadilan Agama di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2022

Palangka Raya, 13 Februari 2023
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Ketua

Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.
NIP. 195807081984031002



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

2

PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Atas Prestasinya Sebagai
"Terbaik Peringkat II"
Kategori Administrasi Banding Terbaik
Pada Penilaian Kinerja Terbaik Pengadilan Agama di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2022

Palangka Raya, 13 Februari 2023
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Ketua

Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.
NIP. 195807081984031002



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

diberikan kepada

PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Sebagai

TERBAIK

Pada Penilaian Prestasi Kinerja Terbaik
Pengadilan Agama di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021
Kategori Implementasi dan Kelengkapan Data Aplikasi SIKEP
Mahkamah Agung RI
Palangka Raya, 22 Maret 2022
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Ketua,

Drs. H. SUDIRMAN S., S.H., M.H
NIP. 19561110 198403 1 002



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

2

PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Atas Prestasinya Sebagai
"Terbaik Peringkat II"
Kategori Persentase Terbanyak Implementasi E-Litigation
Pada Penilaian Kinerja Terbaik Pengadilan Agama di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2022

Palangka Raya, 13 Februari 2023
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Ketua

Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.
NIP. 195807081984031002

MOTTO
BAHALAP
AKUNTABEL



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

diberikan kepada

PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Sebagai

PERINGKAT I

Pada Penilaian Prestasi Kinerja Terbaik
Pengadilan Agama di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021
Dalam Pengembangan Inovasi Pengadilan Terbanyak
Palangka Raya, 22 Maret 2022
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Ketua,

Drs. H. SUDIRMAN S., S.H., M.H
NIP. 19561110 198403 1 002



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

diberikan kepada

PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Sebagai

PERINGKAT I

Pada Penilaian Prestasi Kinerja Terbaik
Pengadilan Agama di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021
Kategori Implementasi Kelengkapan Dekorum
Palangka Raya, 22 Maret 2022
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Ketua,

Drs. H. SUDIRMAN S., S.H., M.H
NIP. 19561110 198403 1 002



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

diberikan kepada

PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Sebagai

PERINGKAT I

Pada Penilaian Prestasi Kinerja Terbaik
Pengadilan Agama di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021
Dalam Administrasi Perkara Banding Tercepat dan Lengkap
Palangka Raya, 22 Maret 2022
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Ketua,

Drs. H. SUDIRMAN S., S.H., M.H
NIP. 19561110 198403 1 002



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

diberikan kepada

PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Sebagai

PERINGKAT II

Pada Penilaian Prestasi Kinerja Terbaik
Pengadilan Agama di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021
Kategori Implementasi PTSP Terbaik
Palangka Raya, 22 Maret 2022
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Ketua,

Drs. H. SUDIRMAN S., S.H., M.H
NIP. 19561110 198403 1 002



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

diberikan kepada

PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Sebagai

PERINGKAT II

Pada Penilaian Prestasi Kinerja Terbaik
Pengadilan Agama di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021
Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 04
Palangka Raya, 22 Maret 2022
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Ketua,

Drs. H. SUDIRMAN S., S.H., M.H
NIP. 19561110 198403 1 002



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

diberikan kepada

PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Sebagai

PERINGKAT III

Pada Penilaian Prestasi Kinerja Terbaik
Pengadilan Agama di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021
Kategori Keberhasilan Mediasi
Palangka Raya, 22 Maret 2022
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Ketua,

Drs. H. SUDIRMAN S., S.H., M.H
NIP. 19561110 198403 1 002



TAPM
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Agama

Nomor : 140/DjA/SERT-APM/06/2018

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Palangkaraya Kelas IB

Terakreditasi : "A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2021, dengan rencana audit *surveillance* pada :

I. Juni 2019
II. Juni 2020
III. Juni 2021

Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

PROFIL PENYUSUN



Dr. Yusri, S.Ag., M.H.
Pengarah



M. Sa'dan, S.Ag.
Ketua TIM



Dra.Hj. Zuraidah Hatimah,S.H. M.H.I
Anggota



Misran, S.H.
Sekretaris I



H. Iman Sahlani, S.Ag.
Sekretaris II



Hj. Siti Rumiah, S.H.I.
Anggota



Hj. Mursitin, S.H.
Anggota



Noor Rasimah, S.H.
Anggota



Suwondo, S.E.
Anggota

PROFIL PENYUSUN



Murniwati R. Saputra, S.H.
Anggota



Norrachmad Ariyanto, S.T., M.E.
Anggota



Ahmad Fauzi, S.T.
Anggota



Saputri Rizki Ramadhanti, A.Md. Ak.
Anggota



Helena Nurul Azmi, S.H.
Anggota



Binti Nasikatin, S.Kom
Anggota



Rahmad Suaidi, S.Kom
Anggota



Kholif Fatur Rosidin, S.Pd
Anggota